

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOTA SALATIGA

TAHUN

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2021. Penyusunan laporan kinerja pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kota Salatiga Tahun 2021 ini menyajikan realisasi kinerja atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Salatiga dan merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 untuk tahun yang keempat. Secara Umum realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam kriteria sangat baik, artinya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun 2021 telah berhasil, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2021. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Salatiga, 4 Maret 2021
WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO, SE, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ke-4 periode RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota yang telah dicanangkan pada tahun 2021.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 14 sasaran dengan 22 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2021 disimpulkan bahwa **15** (lima belas) Indikator Kinerja Utama atau **68,18%** dikategorikan **Sangat Baik**, **7** (tujuh) Indikator Kinerja Utama atau **31,82%** dikategorikan **Baik**.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Kategori	Efisiensi
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah	9,93 tahun	10,66 tahun	107,35%	Sangat Baik	99,11%
		Harapan Lama Sekolah	14,99 tahun	15,42 tahun	102,87%	Sangat Baik	99,08%
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	54%	118,53%	219,50%	Sangat Baik	99,59%
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat dalam Porda	Rangking 5	Rangking 6	80%	Baik	99,81%
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Usia Harapan Hidup	77,31 tahun	77,55 tahun	100,31%	Sangat Baik	99,08%
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,34%	0,83%	138,06%	Sangat Baik	99,40%
5	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks/ Angka Kriminalitas	0,07	0,033	152,86%	Sangat Baik	99,48%

6	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	45%	50%	111,11%	Sangat Baik	99,32%
7	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	100,00%	96,21%	96,21%	Baik	99,09%
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,51	58,65	92,35	Baik	99,16%
9	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	3,99%	1,94%	151,38%	Sangat Baik	99,45%
10	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk	Pertumbuhan ekonomi	2,1%	3,33%	158,57%	Sangat Baik	99,46%
		PDRB Perkapita (ribu rupiah)	70.913 Ribu Rupiah	71.260 Ribu Rupiah	109,49%	Sangat Baik	99,06%
11	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	2,81%	154,35%	5492,88 %	Sangat Baik	99,98%
		Tingkat penganggur an terbuka	7,5%	7,26%	103,20%	Sangat Baik	99,37%

12	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Prosentase Penduduk Miskin	5,5%	5,14%	106,55%	Sangat Baik	99,11%
		Skor Pola Pangan Harapan	92	90	97,83%	Baik	99,04%
13	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Skor capaian Kota Layak Anak (KLA)	675	607,35	89,98%	Baik	99,97%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,01	95,18	98,11%	Baik	99,10%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,45	76,07	93,39%	Baik	99,02%
		Indeks Pembangunan Manusia IPM)	75	83,60	111,47%	Sangat Baik	99,08%
14	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	65	70,95	109,15%	Sangat Baik	99,28%
EFISIENSI							**99,27%**

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pencapaian 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp.1.068.992.597.512,- dengan realisasi sebesar Rp.956.501.304.732,- atau sebesar 89,48%.

Berdasarkan data diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian 22 indikator kinerja Pemerintah Kota Salatiga sebesar 99,27%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Salatiga kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar viii
Daftar Tabel ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan dan Manfaat 2
1. Tujuan 2
2. Manfaat 2
D. Gambaran Umum 3
1. Aspek Geografis 3
2. Aspek Demografis 7
3. Aspek Pemerintahan 8
E. Isu Strategis Pembangunan 13
F. Sistematika 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
A. Rencana Strategis 18
1. Visi 18
2. Misi 20
3. Tujuan dan Sasaran 21
B. Arah Kebijakan Jangka Menengah 25
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 25
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 26
3. Arah Kebijakan Penanganan Covid-19 27
C. Prioritas Pembangunan 28
D. Perjanjian Kinerja 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 36
1. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan PenyelenggaraanPendidikan yang Berkualitas dan Merata Bagi Seluruh Masyarakat 38
1.1. Rata-Rata Lama Sekolah 39
1.2. Harapan Lama Sekolah 42
2. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi Pada Seni dan Karya Budaya serta Melestarikan Warisan Budaya Kota Salatiga 45
3. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga 48
4. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 51

4.1. Angka Usia Harapan Hidup 52
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk..... 56
5. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Tenteram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan 59
6. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata..... 65
7. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Drainase, Pengairan dan Saluran Pembuangan Limbah 69
8. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 73
9. Tujuan/Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata Bagi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup 78
10. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk 83
10.1. Pertumbuhan Ekonomi..... 84
10.2. PDRB perkapita 89
11. Tujuan/Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong Pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga 92
11.1. Pertumbuhan Nilai Investasi..... 92
11.2. Tingkat Pengangguran Terbuka 96
12. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial..... 99
12.1. Persentase Penduduk Miskin..... 100
12.2. Skor Pola Pangan Harapan 103
13. Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender 108
13.1. Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA) 108
13.2. Indeks Pembangunan Gender9IPG) 111
13.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 115
13.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 118

14. Tujuan/ Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan 120
B. Realisasi Anggaran 131
BAB IV PENUTUP 134

LAMPIRAN
1. Capaian IKU dan IKD Tahun 2021
2. Cascading 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kota Salatiga 4
Gambar 1.2 Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah 5

DAFTAR TABEL

1.1 Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW 5
1.2 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin..... 7
1.3 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2021..... 8
1.4 Jumlah PNS Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 11
1.5 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 12
2.1 Penjelasan Makna Visi "Salatiga HATI BERIMAN yang SMART" 19
2.2 Persandingan Visi Kota Salatiga dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 20
2.3 Keterkaitan antar unsur Visi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 Ke dalam masing-masing misi 21
2.4 Rencana Kinerja Kota Salatiga Tahun 2021 30
3.1 Scala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis..... .37
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Lama Sekolah ... .39
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah..... .41
3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Harapan Lama Sekolah..... .42
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah..... .44
3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan ..... .46
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan ..... .47
3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Peringkat Dalam Porda ..... .49
3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Peringkat Dalam Porda ..... .50
3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup .52
3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup ..... .54
3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk ..... .56
3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk..... .58
3.14 Data Perkembangan Tindak Kriminal Tahun 2017-2021 ..... .60
3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Angka Kriminalitas. .60
3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Angka Kriminalitas ..... .62
3.17 Target Penataan Kawasan Wajah Kota ..... .65
3.18 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik..... .66
3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Kawasan Wajah Kota Yang Tertata dengan Baik ..... .67

3.20 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik 70
3.21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik 71
3.22 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74
3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76
3.24 Data Perkembangan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2017-2021 79
3.25 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan 80
3.26 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan 81
3.27 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Ekonomi..... 84
3.28 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 85
3.29 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PDRB Perkapita 89
3.30 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja PDRB Perkapita 90
3.31 Perkembangan Nilai Investasi 2017- 2021 93
3.32 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi 93
3.33 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi 95
3.34 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka 97
3.35 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka 98
3.36 Penduduk Miskin Kota Salatiga 2017 – 2021 100
3.37 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penduduk Miskin..... 100
3.38 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin 102
3.39 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pola Pangan Harapan 103
3.40 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan..... 105
3.41 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kota Layak Anak.. 109
3.42 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Capaian Kota Layak Anak 110
3.43 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Gender 112
3.44 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender 113
3.45 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pemberdayaan Gender 115

3.46 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender 117
3.47 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia 118
3.48 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB 121
3.49 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks PMPRB 122
3.50 Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2012-2021 132
4.1 Data Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021 134

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu akuntablitas, transparasi, demokrasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Demokrasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Kota Salatiga harus memiliki visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dapat dipertanggung jawabkan kinerjanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud upaya untuk mengetahui keseimbangan peran dan fungsi serta meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk

mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat;
b. Sebagai informasi kepada publik atas kinerja Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan saran/masukan dalam perbaikan kinerja.

2. Manfaat

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga;
b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021;
c. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota salatiga di masa yang akan datang.

D. GAMBARAN UMUM

1. Aspek Geografis

Kota Salatiga secara astronomis terletak antara 007˚.17’ dan 007˚.17’.23” Lintang Selatan, dan antara 110˚.27’.56,81” dan 110˚.32’.4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga memiliki ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (DPL) dengan suhu rata-rata 23˚C - 28˚C, sehingga menyebabkan kondisi udara menjadi sejuk.

Secara morfologi Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki gunung Merbabu dan dikelilingi gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung-gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga menjadi subur dan memiliki potensi alam yang cukup besar.

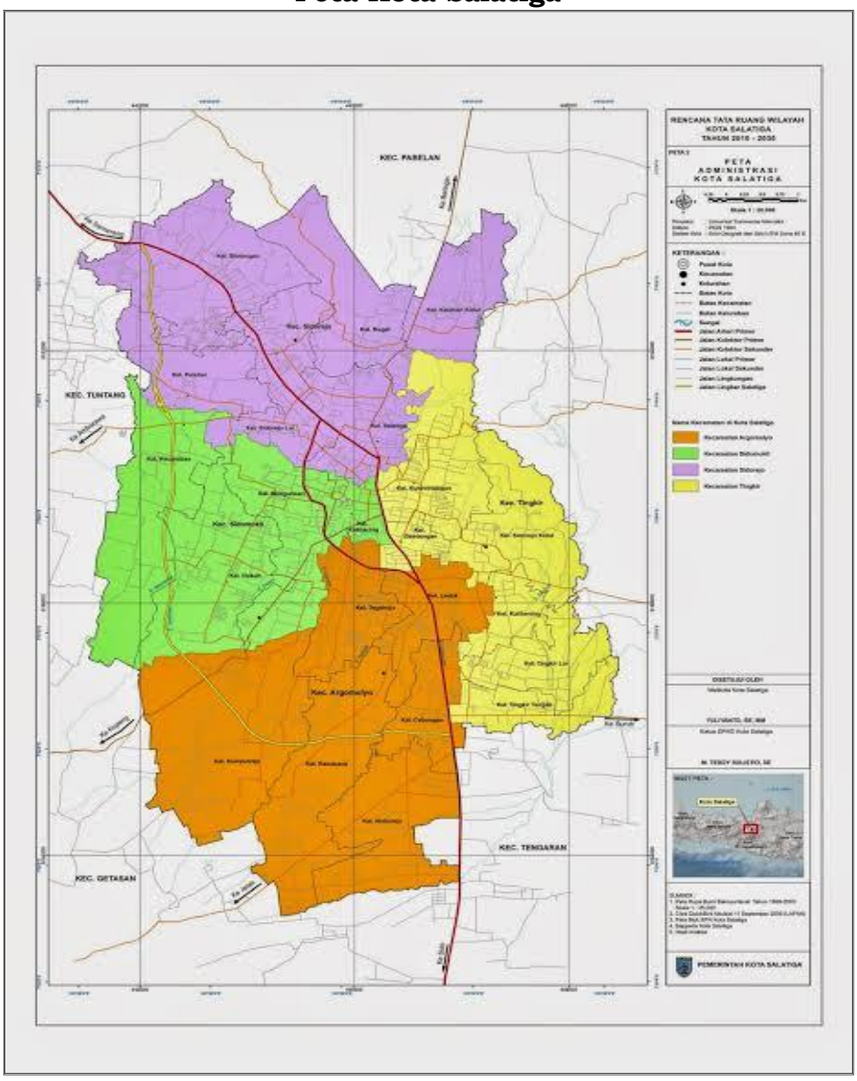
Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu daerah bergelombang (65%), daerah miring (25%), dan daerah datar (10%).

Wilayah administrasi Kota Salatiga berada ditengah-tengah Kabupaten Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
   - Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten
   - Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung
b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
   - Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
   - Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
   - Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
   - Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang Duren
d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
   - Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
   - Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

Adapun Peta Kota Salatiga disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Kota Salatiga



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu bagian dari 6 kota yang ada dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang-Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Hal ini sebagai indikasi bahwa Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah penting dan strategis di Jawa Tengah. Letak Kota Salatiga dalam konstalasi Jawa Tengah disajikan dalam gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar I.2
Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2021 tercatat sebesar 5678 Ha , terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan yang terdiri dari 1.128 Rukun Tetangga (RT) dan 207 Rukun Warga (RW). Adapun rincian luas wilayah kecamatan dan kelurahan serta jumlah RT maupun RW di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	**KECAMATAN SIDOREJO**	**314**	**61**
	1. Kelurahan Salatiga	81	12
	2. Kelurahan Bugel	21	6
	3. Kelurahan Sidorejo Lor	95	16
	4. Kelurahan Blotongan	72	15
	5. Kelurahan Pulutan	20	5
	6. Kelurahan Kauman Kidul	25	7
2.	**KECAMATAN TINGKIR**	**302**	**49**
	1. Kelurahan Kalibening	9	3
	2. Kelurahan Sidorejo Kidul	38	9
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	91	6
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	70	8
	5. Kelurahan Gendongan	38	5
	6. Kelurahan Tingkir Tengah	32	10
	7. Kelurahan Tingkir Lor	24	8
3.	**KECAMATAN SIDOMUKTI**	**235**	**39**
	1. Kelurahan Mangunsari	96	16
	2. Kelurahan Dukuh	74	10
	3. Kelurahan Kecandran	26	6
	4. Kelurahan Kalicacing	39	7

4.	**KECAMATAN ARGOMULYO**	**277**	**58**
	1. Kelurahan Ledok	71	14
	2. Kelurahan Cebongan	22	6
	3. Kelurahan Tegalrejo	62	9
	4. Kelurahan Randuacir	41	9
	5. Kelurahan Kumpulrejo	44	10
	6. Kelurahan Noborejo	37	10
	JUMLAH	**1128**	**207**

Sumber : Data Statistik Sektoral, Semester I 2021

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 135.2/0012576 tentang penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tanggal 18 September 2020, dengan telah ditetapkannya segmen batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang maka Luas wilayah administrasi Kota Salatiga terjadi perubahan dimana luas sebelumnya 5678 Ha menjadi seluas 5498 Ha.

Kota Salatiga merupakan bagian dari kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitas jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian struktur ruang wilayah di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pusat Pelayanan Kota adalah sebagai pusat perdagangan jasa dan perkantoran, meliputi:
   - Kelurahan Salatiga
   - Kelurahan Kutowinangun
   - Kelurahan Gendongan
   - Kelurahan Kalicacing
b. Subpusat Pelayanan Kota Sidorejo adalah sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata. Terletak di Kelurahan Sidorejo Lor.
c. Subpusat Pelayanan Kota Sidomukti adalah sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan dan pemukiman. Terletak di Kelurahan Mangunsari.
d. Subpusat Pelayanan Kota Argomulyo adalah sebagai pengembangan kegiatan yang berbasis pertanian (agrowisata dan agroindustri) dan industri. Terletak di Kelurahan Randuacir.

e. Subpusat Pelayanan Kota Tingkir adalah sebagai pengembangan kegiatan yang berbasis industri dan pertanian lahan basah. Terletak di Kelurahan Sidorejo Kidul.
f. Pusat Lingkungan, sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi, meliputi:
   - Kelurahan Blotongan
   - Kelurahan Bugel
   - Kelurahan Kauman Kidul
   - Kelurahan Pulutan
   - Kelurahan Kalibening
   - Kelurahan Tingkir Lor
   - Kelurahan Tingkir Tengah
   - Kelurahan Noborejo
   - Kelurahan Ledok
   - Kelurahan Tegalrejo
   - Kelurahan Kumpulrejo
   - Kelurahan Cebongan
   - Kelurahan Kecandran
   - Kelurahan Dukuh

2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2021 sebanyak 196.440 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 358 jiwa atau 0,18% dibandingkan tahun 2020. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2021 adalah sebanyak 97.382 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 99.058 jiwa. Rasio jenis Kota Salatiga sebesar 98,31% atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2016	92.401	93.915	186.316	98,39
2	2017	95.381	96.697	192.078	98,64
3	2018	96.490	98.121	194.611	98,34
4	2019	97.026	98.537	195.563	98,46
5	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
6	2021	97.382	99.058	196.440	98,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2021 tertinggi terdapat di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.284 jiwa dan terendah terdapat di Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk 45.054 jiwa. Data persebaran penduduk per

Kecamatan di Kota Salatiga pada tahun 2021 disajikan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2021

No	Kecamatan/Kelurahan	L	P	Jumlah
1.	**KECAMATAN SIDOREJO**	**26.818**	**27.466**	**54.284**
	1. Kelurahan Salatiga	7.120	7.295	14.415
	2. Kelurahan Bugel	1.757	1.741	3.498
	3. Kelurahan Sidorejo Lor	7.000	7.367	14.367
	4. Kelurahan Blotongan	6.554	6.567	13.121
	5. Kelurahan Pulutan	2.309	2.319	4.628
	6. Kelurahan Kauman Kidul	2.078	2.177	4.255
2.	**KECAMATAN TINGKIR**	**23.093**	**23.745**	**46.838**
	1. Kelurahan Kalibening	1.191	1.157	2.348
	2. Kelurahan Sidorejo Kidul	3.701	3.822	7.523
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	6.461	6.610	13.071
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	3.979	4.271	8.196
	5. Kelurahan Gendongan	2.595	2.729	5.324
	6. Kelurahan Tingkir Tengah	2.685	2.676	5.361
	7. Kelurahan Tingkir Lor	2.481	2.534	5.015
3.	**KECAMATAN ARGOMULYO**	**25.172**	**25.092**	**50.264**
	1. Kelurahan Ledok	5.530	5.506	11.036
	2. Kelurahan Cebongan	2.556	2.575	5.131
	3. Kelurahan Tegalrejo	6.184	6.123	12.307
	4. Kelurahan Randuacir	3.405	3.396	6.801
	5. Kelurahan Kumpulrejo	4.173	4.138	8.311
	6. Kelurahan Noborejo	3.324	3.354	6.678
4.	**KECAMATAN SIDOMUKTI**	**22.299**	**22.755**	**45.054**
	1. Kelurahan Mangunsari	8.681	8.813	17.494
	2. Kelurahan Dukuh	7.072	7.224	14.296
	3. Kelurahan Kecandran	3.550	3.508	7.058
	4. Kelurahan Kalicacing	2.996	3.210	6.206
JUMLAH		**97.382**	**99.058**	**196.440**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

3. Aspek Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung DPRD;
c. Inspektorat Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    2. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    4. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
    6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
    7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan;
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
13. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata;
18. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi.

e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.

f. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, terdiri atas:
   1. Kecamatan Argomulyo Tipe A
   2. Kecamatan Sidorejo Tipe A;
   3. Kecamatan Tingkir Tipe A; dan
   4. Kecamatan Sidomukti Tipe B.

g. Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga).

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Pada Tahun 2021 jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 3318 Orang, yang terdiri dari 1451 laki-laki dan 1867 perempuan. Selengkapnya jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah PNS Kota Salatiga
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	L	P	JUMLAH
1	Inspektorat Daerah	21	15	36
2	Sekretariat Daerah	71	55	126
3	Sekeretariat DPRD	14	11	25
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	25	44
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	17	35
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	39	27	66
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13	18	31
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	12	24
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16	13	29
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	13	27
11	Dinas Kesehatan	75	263	338
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	12	37
13	UPT Rumah Sakit Umum Daerah padda Dinas Kesehatan	167	299	466
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13	10	23
15	Dinas Lingkungan Hidup	121	14	135
16	Dinas Pangan dan Pertanian	38	33	71
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34	10	44

18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16	21	37
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	13	23
20	Dinas Pendidikan	393	771	1164
21	Dinas Perdagangan	53	9	62
22	Dinas Perhubungan	24	9	33
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17	10	27
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	20	33
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22	15	37
26	Dinas Sosial	13	19	32
27	Satuan Polisi Pamong Praja	43	7	50
28	Kecamatan Tingkir	40	32	72
29	Kecamatan Sidorejo	34	32	66
30	Kecamatan Sidomukti	26	30	56
31	Kecamatan Argomulyo	37	32	69
	TOTAL	**1451**	**1867**	**3318**

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

Sedangkan komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan jabatan tahun 2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Inspektorat Daerah	7	5	24	36
2	Sekretariat Daerah	43	62	21	126
3	Sekretariat DPRD	10	12	3	25
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	17	15	44
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	16	2	35
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	29	34	3	66
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16	11	4	31
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	12	2	24
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	18	1	29
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	10	4	27
11	Dinas Kesehatan	18	62	258	338
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	13	11	37
13	UPT RSUD pada Dinas Kesehatan	24	99	343	466
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	12	1	23

15	Dinas Lingkungan Hidup	14	117	4	135
16	Dinas Pangan dan Pertanian	17	28	26	71
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	16	7	44
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16	18	3	27
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	8	2	23
20	Dinas Pendidikan	16	61	1087	1164
21	Dinas Perdagangan	15	44	3	62
22	Dinas Perhubungan	9	15	9	33
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11	10	6	27
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	5	15	33
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14	23	0	37
26	Dinas Sosial	16	11	5	32
27	Satuan Polisi Pamong Praja	13	24	13	50
28	Kecamatan Tingkir	43	23	6	72
29	Kecamatan Sidorejo	37	25	4	66
30	Kecamatan Sidomukti	28	24	4	56
31	Kecamatan Argomulyo	30	25	6	69
	TOTAL	**566**	**860**	**1892**	**3318**

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya penduduk miskin akibat dampak Covid-19;
2. Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;

3. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk;
4. Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah;
6. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur;
7. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang;
8. Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah.

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2020 dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021, maka perekonomian Kota Salatiga masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dan adanya gelombang kedua pandemi Covid-19. Beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Bertambahnya angka pengangguran terbuka
   Dengan diterapkannya kebijakan PPKM sesuai dengan level kriteria Kabupaten/Kota, serta adanya kondisi peningkatan jumlah kasus paparan Covid-19 di Kota Salatiga pada triwulan kedua sampai triwulan ketiga tahun 2021, Kota Salatiga berada pada level 4, dimana seluruh sektor usaha non esensial harus ditutup. Hal ini berakibat pada penambahan jumlah pengangguran yang mana pada akhir tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga mencapai 7,44%.
2. Bertambahnya jumlah penduduk miskin
   Pada akhir tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Salatiga yaitu 4,94%, angka ini meningkat jika dibanding tahun 2019. Dengan adanya gelombang kedua pandemi covid-19 yang berdampak signifikan pada sektor ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Salatiga juga bertambah. Data BPS, angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 11,79% meningkat dari angka kemiskinan pada akhir tahun 2020 sebesar 11,41%.
3. Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan
   Dampak pandemi covid-19 pada sektor keuangan negara berimbas pada dana transfer pusat ke daerah. Pada tahun 2020 dana perimbangan dari transfer pemerintah pusat untuk Kota Salatiga tercatat sebesar 522 milyar, menurun 47,3 milyar dari tahun sebelumnya (2019) yaitu sebesar 569,3 milyar. Penurunan ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan daerah yang harus diimbangi dengan menurunkan belanja daerah.

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang berpengaruh pada perekonomian Kota Salatiga
   Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kuartal II tahun 2021 tercatat pada angka 5,66% meningkat dari kuartal I yang masih di angka -0,84%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07%. Fluktuasi kondisi perekonomian ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi daerah.

Berdasarkan evaluasi permasalahan pencapaian target kinerja program, pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan utama. Dengan demikian, prioritas penyelesaian diarahkan kepada penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran pada urusan kesehatan
   Anggaran pada bidang kesehatan digunakan untuk belanja penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayah, insentif tenaga kesehatan serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
   Pengalokasian anggaran tersebut walaupun secara tidak langsung meningkatkan capaian target kinerja program, tetapi tetap penting untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan per urusan pembangunan daerah.
2. Pengalokasian anggaran untuk pemulihan ekonomi daerah
   Dampak Pandemi Covid-19 bagi masyarakat, terutama pada sektor ekonomi dan sosial, diperlukan pengalokasian anggaran untuk belanja pemulihan ekonomi daerah. Belanja untuk pemulihan ekonomi daerah diprioritaskan untuk dukungan ekonomi dan perlindungan sosial. Pengalokasian anggaran pada belanja untuk dukungan ekonomi diarahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan-urusan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdapatan perkapita penduduk, yaitu urusan UMKM, koperasi, kelautan dan perikanan, Peranian, dan Perdagangan. Sedangkan pengalokasian anggaran pada belanja untuk dukungan perlindungan sosial diarahkan kepada Perangkat Daerah yang berhubungan langsung urusan-urusan pembangunan manusia, yaitu urusan kebudayaan dan pariwisata, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen LkjIP Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kota Salatiga tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN–LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2017–2022 selengkapnya disajikan sebagai berikut:

1. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Salatiga ditetapkan visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2017-2022, yaitu:

"*SALATIGA HATI BERIMAN yang SMART*".

Pernyataan Visi tersebut memiliki makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata "HATI BERIMAN" dan kata "SMART". Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sedangkan kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan BERMARTABAT.

Penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penjelasan Makna Visi
"Salatiga HATI BERIMAN yang SMART"

Unsur Visi	Penjelasan
Hati Beriman	Secara harfiah "HATI BERIMAN' megandung arti "Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing". "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" mempunyai makna "Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil –spiritual". (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993)
Sejahtera	Mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan
Mandiri	Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan
Bermartabat	Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Visi pembangunan Kota Salatiga tahun 2017-2022 menuju pada kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdikari. Jika disandingkan dengan visi pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Persandingan Visi Kota Salatiga
dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Nasional		Provinsi Jawa Tengah		Kota Salatiga	
RPJPN 2005–2025	**RPJMN 2015-2019**	**RPJPD 2005–2025**	**RPJMD 2013-2018**	**RPJPD 2005–2025**	**RPJMD 2017-2022**
Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur	Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, Dan Lestari	Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, (Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi)	Salatiga Yang Maju, Demokratis Dan Nyaman	Salatiga Hati Beriman Yang Smart (Sejahtera, Mandiri Dan Bermartabat)

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

2. MISI

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022 "**Salatiga Hari Beriman yang Smart**" ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.

Misi 3 : Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah

Misi 4 : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota

Misi 6 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

Misi 7 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak

Misi 8 : Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan

Misi 9 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Keterkaitan antar unsur Visi RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 ke dalam masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Keterkaitan antar unsur Visi RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 ke dalam masing-masing misi

No	Unsur Visi Salatiga HATI BERIMAN yang SMART	Misi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022
A.	**Frase Sehat**	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
B.	**Frase Tertib dan Aman**	3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
C.	**Frase Bersih dan Indah**	4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
		5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
D.	**Frase Mandiri**	6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
		7. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak
E.	**Frase Sejahtera**	8. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan
F.	**Frase Bermartabat**	9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Tujuan dan Sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Misi 1 : **Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya**

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	1	Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	1	Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	1	Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak
		2	Menurunnya penyakit menular dan tidak menular
		3	Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Misi 3 : Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah

Tujuan		Sasaran	
1	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	1	Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif

Misi 4 : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi
		2	Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	1	Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta pembuanga air limbah
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		2	Penyediaan dan optimalisasi sarana trasnportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.	1	Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat

Misi 6 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	1	Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri
		2	Meningkatnya kinerja perdagangan
		3	Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan
		4	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat
		5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Misi 7 : Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.	1	Meningkatnya realisasi investasi
		2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah

Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	1	Meningkatnya kualitas penanganan PMKS
		2	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman
2	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.	1	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, Kesetaraan dan keberdayaan perempuan

Misi 9 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik
		2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		3	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur sipil negara (ASN)
		4	Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah

B. ARAH KEBIJAKAN

Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2017-2022 dengan efektif dan efisien tetap memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 dan adanya gelombang kedua pandemi, merubah arah kebijakan ekonomi daerah Kota Salatiga dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional. Namun demikian Kota Salatiga tetap mengacu pada Visi dan Misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan tertutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat selama pandemi Covid-19 dengan didukung upaya vaksinasi yang masif di

Kota Salatiga. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Kondisi perekonomian Kota Salatiga di tahun 2021 perlu mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro di berbagai sub sektor. Dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan. Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan penanganan bidang kesehatan dan reformasi sosial sebagai dampak pademi Covid-19. Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen pemerintah Kota Salatiga menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan dengan adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 serta berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu Pemerintah Kota Salatiga harus tetap meningkatkan pelayanan publik meski dalam situasi pandemi Covid-19 sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan tata pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

3. Arah Kebijakan Penanganan Covid-19

Pada semester satu tahun 2021, APBD Kota Salatiga mengalami tiga kali perubahan sebagai upaya penanganan gelombang kedua pandemi covid-19. Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun 2021 sebesar 10 milyar, sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar 64 milyar. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, arah kebijakan pemerintah Kota Salatiga dalam menangani pandemi Covid-19 diantaranya sebagai berikut:

a. Penyediaan rumah singgah sehat;
b. Bantuan sembako untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri;
c. Melaksanakan tracing, testing dan treatment yang massif atas penambahan kasus Covid-19;
d. Mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat;
e. Penyediaan fasilitas pemakaman Covid-19;
f. Penambahan ruang isolasi pada RSUD.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga tahun 2021 ditujukan untuk **"Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Salatiga MANDIRI"** yang merupakan tema pembangunan untuk mendukung pencapaian Misi 6 dan Misi 7. Pada tahap ini pembagunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan dengan usaha besar, kemudahan akses permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk, peningkatan kinerja perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan jaringan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.

Pembangunan juga diprioritaskan pada produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak. Peningkatan produksi perikanan mellaui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Pembangunan juga difokuskan pada pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hokum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi, penyediaan tenaga kerja terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, serta penanggulangan dampak Covid-19 untuk memulihkan ekonomi, reformasi sosial dan menanggulangi kemiskinan, maka pada tahun 2021 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan Lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran produk;

2. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga;
3. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar;
4. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah;
5. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan;
6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan;
7. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternative dan diversifikasi produk pangan;
8. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan;
9. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi;
10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar;
12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan;
13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2021:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Kota Salatiga Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,99
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	Cakupan seni dan Cagar budaya yang dilestarikan	%	54
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat dalam Porda	Ranking	5
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,31
		Laju Pertumbuhan penduduk	%	1,34
5	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks/Angka Kriminalitas	Indeks	0,07
6	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan baik	%	45
7	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	100,00
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,51

9	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan.	%	3,99
10	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,1
		Produk Domestik Regional Bruto per kapita	Ribu Rupiah	70.913
11	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	2,81
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,5
12	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Penduduk Miskin	%	5,5
		Pola Pangan Harapan	Skor	92
13	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.	Capaian Kota Layak Anak	Skor	675
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	75
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,01
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,45
14	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Indeks	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	698.321.058.119
2	Program Pengelolaan Pendidikan	38.930.745.206
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	312.690.000
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	99.566.900
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	72.320.353.189
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.283.730.200
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	520.521.000
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.985.445.000
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.949.014.000
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.322.661.810
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.548.104.000
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.793.408.000
13	Program Penataan Bangunan Gedung	808.499.000
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	20.029.429.800
15	Program Penyelenggaraan Jalan	45.170.846.453
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	567.239.800
17	Program Pengembangan Perumahan	499.545.180
18	Program Kawasan Permukiman	2.938.733.800
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.984.399.682
20	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.196.954.700
21	Program Penanggulangan Bencana	71.099.900
22	Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	231.491.300
23	Program Pemberdayaan Sosial	934.529.700
24	Program Rehabilitasi Sosial	1.083.967.900
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.223.282.300
26	Program Penanganan Bencana	1.422.346.030
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	247.999.610
28	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	231.470.000
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	0

30	Program Hubungan Industrial	133.163.000
31	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	339.727.000
32	Program Perlindungan Perempuan	81.002.000
33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	898.607.000
34	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	71.914.000
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	46.795.000
36	Program Perlindungan Khusus Anak	20.223.000
37	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	387.916.100
38	Program Penanganan Kerawanan Pangan	495.139.500
39	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6.623.100
40	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.000.273.800
41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	176.240.000
42	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0
43	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	890.409.000
44	Program Penatagunaan Tanah	576.462.800
45	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	199.779.000
46	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	220.358.800
47	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	12.022.074.756
48	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	308.320.500
49	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	32.130.400
50	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48.941.800
51	Program Pengelolaan Persampahan	1.575.352.453
52	Program Pendaftaran Penduduk	851.931.800
53	Program Pencatatan Sipil	80.187.600
54	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	53.984.000
55	Program Pengendalian Penduduk	64.434.700
56	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.526.756.900
57	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	82.605.000
58	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.846.917.650
59	Program Informasi dan Komunikasi Publik	637.056.600
60	Program Aplikasi Informatika	3.392.015.600
61	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25.526.700

62	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	17.725.900
63	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	59.799.900
64	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	24.771.000
65	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	917.287.500
66	Program Pengembangan UMKM	70.000.000
67	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	123.999.000
68	Program Promosi Penanaman Modal	152.672.900
69	Program Pelayanan Penanaman Modal	273.534.300
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	362.409.200
71	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	633.728.800
73	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.584.332.900
74	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	580.146.900
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	86.194.000
76	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	106.967.600
77	Program Pengembangan Kebudayaan	160.197.600
78	Program Pembinaan Sejarah	91.529.700
79	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	25.000.000
80	Program Pembinaan Perpustakaan	605.146.000
81	Program Pengelolaan Arsip	510.635.600
82	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3.998.800
83	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	188.458.501
84	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.094.941.509
85	Program Pemasaran Pariwisata	99.986.800
86	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	834.276.150
87	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.689.928.800
88	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	97.565.000
89	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	89.695.000
90	Program Penyuluhan Pertanian	543.079.100
91	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	95.004.000
92	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	24.609.049.900
93	Program Stabilisasi Harga Barang Kenutuhan Pokok dan Barang Penting	31.113.900

94	Program Pengembangan Ekspor	0
95	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	209.119.600
96	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	323.618.000
97	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	29.794.000
98	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.303.068.500
99	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.082.301.500
100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24.151.252.900
101	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	930.218.400
102	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.838.275.500
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.913.998.000
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.537.738.300
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	596.788.300
106	Program Kepegawaian Daerah	2.045.908.050
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.604.745.900
108	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.177.800
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	58.130.700
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	316.954.600
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	248.438.000
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.769.254.800
113	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.373.690.600
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	231.400.300
115	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0
116	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	81.793.000
117	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.058.213.964
118	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.605.561.500
119	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	167.872.000
120	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	548.104.900
JUMLAH		**1.068.992.597.512**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2021 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Salatiga (PK Perubahan Kota Salatiga) Tahun 2021.

Laporan Kinerja dilengkapi dengan Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\textit{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \textit{ X 100\%}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja, digunakan rumus:

$$\textit{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textit{Rencana} - (\textit{Realisasi} - \textit{Rencana})}{\textit{Rencana}} \textit{ X 100\%}$$

atau dengan menggunakan rumus:

$$\textit{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \textit{Rencana}) - \textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \textit{ X 100\%}$$

Selanjutnya untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan kriteria penilaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Scala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	< 55%	Kurang

Capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis pada tahun 2021 dilakukan analisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya digunakan rumus sebagai mana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
CKi : Capaian Keluaran i

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Hasil analisa capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis (IKU) Pemerintah Kota Salatiga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Seluruh Masyarakat.**

   Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

   Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendididikan Dasar dan Pendidikan NonFormal Bagi Masyarakat dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

   1. Angka Partisipasi Sekolah PAUD
   2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
   3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah:

   - Dinas Pendidikan

   Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah tidak terlepas dari tercapainya target kinerja Indikator Kinerja Daerah pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat.

   Perhitungan dan Pengolahan data untuk mengukur realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dilakukan oleh BPS.

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah.

1.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Capaian kinerja pada IKU Rata-rata Lama Sekolah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,85	9,87	9,89	9,91	9,93	9,95
Realisasi							
Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	10,15	10,4	10,42	10,66	
Capaian Kinerja							
Rata Rata Lama Sekolah	%	99,70	102,84	105,16	105,15	107,35	
Kategori		**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : BPS

Indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

   Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 adalah sebesar 9,93 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 10,66 tahun, sehingga capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021 adalah 107,35% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

   Realisasi kinerja untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2017 sebesar 9,82 tahun, tahun 2018 sebesar 10,15 tahun, tahun 2019 sebesar 10,4 tahun, tahun 2020 sebesar 10,42 tahun, dan tahun 2021 sebesar 10,66 tahun yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah sebesar 9,95, sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 10,66 tahun. Dengan demikian target RPJMD untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 107,14%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .**

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas tahun 2021 adalah 8,54 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga tahun 2021 adalah 10,66 tahun. Dengan demikian Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia secara nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pendidikan menjadi salah satu aspek untuk mengukur capaian kinerja pada indikator ini. Indikator kinerja rata-rata lama sekolah dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Keberhasilan pencapaian indikator angka partisipasi dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan serta Beasiswa Siswa Kurang Mampu.

Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah adalah :

1. Memberikan peluang yang luas pada pendidikan Non Formal seperti Kejar Paket;
2. Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi;
3. Pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu;
4. Pemberian penghargaan bagi siswa yang memiliki prestasi melalui kegiatan lomba bidang pendidikan.
5. Meningkatkan pelayanan anak berkebutuhan khusus.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Rata-rata Lama Sekolah	107,35	Pengelolaan Pendidikan	38.930.745.206	35.911.780.048	92,25%	99,10%
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	312.690.000	303.176.700	96,96%	99,10%
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	99.566.900	91.462.000	94,70%	99,12%
Efisiensi						**99,11%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran Rp.38.930.745.206,- dan terealisasi Rp.35.911.780.048,- atau sebesar 92,25%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp.312.690.000,- dan terealisasi Rp.303.690.000,- atau sebesar 96,96%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan anggaran Rp.99.566.900,- dan terealisasi Rp.91.462.000,- atau sebesar 94,70%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 99,11%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah meningkatnya PAUD *Holistic integrative* dan penyelenggaraan PAUD sesuai standar nasional, meningkatnya akses Pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau serta meningkatnya Pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.

1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Harapan Lama Sekolah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,98	14,98	14,98	14,99	14,99	14,99
Realisasi							
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,98	14,99	15	15,41	15,42	
Capaian Kinerja							
Harapan Lama Sekolah	%	100	100,07	100,13	102,80	102,87	
Kategori		**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : BPS

Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021 sebesar 14,99 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 15,42 tahun, sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah 102,87% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama

Sekolah (HLS) pada tahun 2017 sebesar 14,98 tahun, tahun 2018 sebesar 14,99 tahun, tahun 2019 sebesar 15 tahun, tahun 2020 sebesar 15,41 tahun dan realisasi tahun 2021 sebesar 15,42 tahun, yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**
Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 14,99 tahun, sedangkan realisasi kinerja tahun 2021 telah mencapai 15,42 tahun. Dengan demikian target RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 102,87%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Berdasarkan data BPS, Harapan lama Sekolah (HLS) Penduduk Indonesia sebesar 13,08 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,08 tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan setingkat Diploma I. Sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga adalah 15,42 tahun. Dengan demikian Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Harapan Lama Sekolah Penduduk Indonesia secara nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Harapan lama sekolah berpengaruh terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Terdapat empat kriteria untuk investasi pengembangan sumber daya manusia yaitu:
1. Kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi;
2. Perluasan pendidikan dasar yang dipandang memiliki tingkat keuntungan/manfaat *(rate of return)* yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya;
3. Pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan masal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan;
4. Keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan memeperoleh pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lain baik secara geografis, sosial, dan ekonomis.

Keberhasilan pencapaian indikator angka partisipasi dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan serta Beasiswa Siswa Kurang Mampu.

Di Kota Salatiga Angka Partisipasi Sekolah PAUD 84,81%, angka partisipasi SD/MI sebesar 99,22%, angka partisipasi sekolah SMP/MTs 96,72% angka melek huruf 99,59%, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,005% dan angka putus sekolah SMP/MTs 0,44%.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Harapan Lama Sekolah	102,87	Pengelolaan Pendidikan	38.930.745.206	35.911.780.048	92,25%	99,10%
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	312.690.000	303.176.700	96,96%	99,06%
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	99.566.900	91.462.000	94,70%	99,08%
Efisiensi						**99,08%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran Rp.38.930.745.206,- dan terealisasi Rp.35.911.780.048,- atau sebesar 99,10%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp.312.690.000,- dan terealisasi Rp.303.690.000,- atau sebesar 96,96%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan anggaran Rp.99.566.900,- dan terealisasi Rp.91.462.000,- atau sebesar 94,70%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 99,08%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah meningkatnya PAUD *Holistic integrative* dan penyelenggaraan PAUD sesuai standar nasional, meningkatnya akses Pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau serta meningkatnya Pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.

2. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi Pada Seni Dan Karya Budaya Serta Melestarikan Warisan Budaya Kota Salatiga.

Tujuan/Sasaran Strategis 2 (dua) meningkatkan Apresiasi Pada Seni dan Karya Budaya serta Melestarikan Warisan Budaya Kota Salatiga hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2021 ini, capaian kinerja Pemerintah Kota Salatiga masih diprioritaskan pada meningkatkan apresiasi dan pembinaan (hanya mencatat, melegalkan dan membina) belum diarahkan pada pelestarian seni dan budaya.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 2 (satu) adalah Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina
2. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 2 (dua) adalah:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk menghitung realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Utama Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan} = \frac{\textit{Capaian persentase Seni dan Komunitas Budaya yang dibina + Capaian Persentase cagar budaya yang dilestarikan}}{2}$$

Dari rumus tersebut diatas maka realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2021 sebesar 118,53%. Realisasi tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\textit{Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan} = \frac{98{,}03 + 161{,}08}{2} = 129{,}55\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang dilestarikan:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	%	38	42	46	50	54	58
Realisasi							
Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	%	38,95	57,8	73,23	88,97	129,55	
Capaian Kinerja	**%**						
Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	%	102,5	137,63	159,19	177,94	239,91	
Kategori		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator kinerja cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2021 sebesar 54% dan terealisasi sebesar 129,55%, sehingga capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2021 adalah 239,91% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**.
   Realisasi kinerja untuk cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2017 sebesar 38,95%, tahun 2018

sebesar 57,8%, tahun 2019 sebesar 73,23%, tahun 2020 sebesar 88,97% sedangkan tahun 2021 sebesar 129,55% yang artinya realisasi dan capaian kinerja untuk indikator cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD adalah sebesar 58%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 129,55% sehingga target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 223,36%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

1. Pengembangan gelar seni budaya yang mengedapankan kearifan lokal.
2. Terlaksananya kajian pelestarian warisan budaya.
3. Peran serta dan kepedulian masyarakat, pelaku budaya, akademisi terhadap seni dan budaya daerah.
4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pementasan yang bersifat nasional/internasional.
5. Pemanfaatan media sosial/youtube untuk menginformasikan pengembangan gelar seni budaya.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pelestarian cagar budaya dan situs secara berkala melalui kerjasama dengan stakeholder dan instansi.
7. Banyaknya penggiat cagar budaya dan sejarahwan di Kota Salatiga

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Cakupan seni dan cagar	239,91	Pengembangan Kebudayaan	160.197.600	155.361.700	96,98%	99,60%

budaya yang dilestarikan		Pembinaan Sejarah	91.529.700	90.515.700	98,89%	99,59%
		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	25.000.000	24.999.000	100%	99,58%
Efisiensi						**99,59%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran Rp.160.197.600,- dan terealisasi Rp.155.361.700,- atau sebesar 96,98%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,60%.
2. Program Pembinaan Sejarah dengan anggaran Rp.91.529.700,- dan terealisasi Rp.90.515.700,- atau sebesar 98,89%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,59%.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran Rp.25.000.000,- dan terealisasi 24.999.000,- atau sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,58%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 99,59%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Program Pengembangan Kebudayaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota kemudian pelestarian kesenian tradisional serta pembinaan Lembaga adat.
2. Program Pembinaan Sejarah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan sejarah lokal.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan cagar budaya.

3. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Peringkat dalam PORDA.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Persentase Pemuda Berwirausaha
2. Persentase Atlet Berprestasi

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah:

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Realisasi IKU Peringkat dalam Porda dihitung berdasarkan capaian ranking Pemerintah Kota Salatiga dalam Porda yang dilaksanakan 4 tahun sekali.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Peringkat dalam PORDA:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peringkat Dalam Porda

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Peringkat dalam PORDA	Ranking	7	6	6	5	5	5
Realisasi							
Peringkat dalam PORDA	Ranking	7	6	6	6	6	
Capaian Kinerja							
Peringkat dalam PORDA	%	100	100	100	80	80	
Kategori		**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Indikator kinerja peringkat dalam PORDA merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) peringkat dalam PORDA tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target tahun 2021 peringkat dalam PORDA adalah peringkat 5 dan terealisasi peringkat 6 sehingga capaian kinerja 80% dengan kategori Baik. Data realisasi ini adalah berdasarkan capaian pada PORDA terakhir yang diikuti Kota Salatiga pada tahun 2018 di Surakarta dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Hal ini disebabkan PORDA diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
   Bila dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 Kota Salatiga berada pada posisi 6 besar, maka pada tahun 2021 belum mengalami peningkatan karena PORDA

diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, sehingga capaian tahun 2021 masih menggunakan capaian tahun 2018.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD adalah Kota Salatiga pada posisi 5 besar PORDA Jawa Tengah, sementara pada tahun 2021 posisi Kota Salatiga masih pada peringkat 6, jadi target dalam RPJMD masih belum tercapai pada tahun ini dengan tingkat kemajuan sebesar 80%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja peringkat dalam PORDA.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan PORDA yang akan datang, Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Belajar Olahraga (KBO) dan Pusat Pengembangan Latihan Olahraga Daerah (PPOPD).
2. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan.
3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga.
4. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
5. Pengadaan peralatan cabang olahraga.
6. Pembibitan atlet sejak usia dini sehingga menghasilkan bibit atlet profesional.
7. Membangun sinergi yang baik antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan induk cabang olahraga dan KONI.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Peringkat Dalam Porda

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Peringkat Dalam PORDA	80	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	633.728.800	590.518.150	93,18%	98,84%
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.584.332.900	5.249.507.100	94,00%	98,82%

		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	580.146.900	575.607.900	99,22%	98,76%
Efisiensi						**98,81%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran Rp.633.728.800,- dan terealisasi Rp.590.518.150,- atau sebesar 93,18%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,84%.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan anggaran Rp.5.584.332.900,- dan terealisasi Rp.5.249.507.100,- atau sebesar 94,00%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,82%.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan anggaran Rp.580.146.900,- dan terealisasi Rp.575.607.900,- atau sebesar 99,22%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,76%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Peringkat Dalam PORDA sebesar 98,81%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mendukung indikator ini program/kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyadaran , pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 5 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan, penyelenggaraan kejuaran olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

4. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka Usia Harapan Hidup dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup adalah:

1. Meningkatnya Angka Keselamatan Ibu dan Anak dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
   a. Angka Kematian Ibu;
   b. Angka Kematian Bayi;
   c. Prevalensi Balita Gizi Buruk.
2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
   a. Success Rate TB Kota Salatiga;
   b. Prevalansi Hipertensi Penduduk Usia diatas 18 tahun.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

- Dinas Kesehatan

Berikut analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup.

4.1. Angka Usia Harapan Hidup

Definisi Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Usia Harapan Hidup merupakan hasil pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Angka Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	76,96	77,05	77,13	77,22	77,31	77,40
Realisasi							
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	76,87	76,98	77,11	77,40	77,55	
Capaian Kinerja							
Angka Usia Harapan Hidup	%	99,88	99,91	99,97	100,23	100,31	
Kategori		**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : BPS

Indikator kinerja angka usia harapan hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target tahun 2021 angka usia harapan hidup sebesar 77,31 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi 77,55 tahun. sehingga capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup tahun 2021 sebesar 100,31% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
   Realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup pada tahun 2017 adalah 76,87 tahun, tahun 2018 adalah 76,98 tahun, tahun 2019 adalah 77,11 tahun, tahun 2020 adalah 77,40 tahun, dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah 77,55 tahun. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup terus mengalami kenaikan.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**
   Target akhir RPJMD untuk indikator kinerja Usia Harapan Hidup adalah 77,40 tahun, dan pada tahun 2021 terealisasi 77,55 tahun. Dengan demikian target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 100,19%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
   Berdasarkan data BPS tahun 2021, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 71,57 tahun, sedangkan di Kota Salatiga Usia Harapan Hidup sudah mencapai 77,55 tahun, dengan demikian Usia Harapan Hidup penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Usia Harapan Hidup Penduduk Indonesia.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
   Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:
   1. Keberhasilan manajemen resiko tinggi di masyarakat melalui kelompok sayang ibu dan pendampingan ibu hamil resiko tinggi.

2. Peningkatan upaya promosi kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pola hidup sehat dengan penerapan GERMAS.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Usia Harapan Hidup	100,31	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	72.320.353.189	58.595.061.573	81,02	99,19
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.283.730.200	4.278.874.143	99,89	99,00%
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	520.521.000	472.075.750	90,69	99,10%
		Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	1.985.445.000	1.954.958.160	98,46%	99,02%
Efisiensi						**99,08%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp.72.320.353.189,- dan terealisasi Rp.58.595.061.573,- atau sebesar 81,02%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp.4.283.730.200,- dan terealisasi Rp.4.278.874.143,- atau sebesar 99,89,00%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan anggaran Rp.520.521.000,- dan terealisasi Rp.472.075.750,- atau sebesar 90,69%,

sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.

4. Program Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan anggaran Rp.1.985.445.000,- dan terealisasi Rp.1.954.958.160,- atau sebesar 98,46%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup sebesar 98,08%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Angka Usia Harapan Hidup, di dukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan pada Dinas Kesehatan dan 1 kegiatan pada RSUD dengan sasaran kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan, penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi dan penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan dan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kegiatan UKP dan UKM.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemberian izin apotek, took obat, took alat kesehatan dan optic, usaha mikro obat tradisional (UMOT), penerbitan sertifikasi produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT, Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
4. Program Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral dan pelaksanaan kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat daerah.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk adalah terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) TFR (*Total Fertility Rate*)

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

- DP3APPKB

4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Definisi Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Laju Pertumbuhan merupakan hasil pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,42	1,4	1,38	1,36	1,34	1,32
Realisasi							
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,38	1,45	1,31	1,18	0,83	
Capaian Kinerja							
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	102,81	96,42	105,07	113,24	138,06	
Kategori		**Sangat Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : DP3APPKB

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tahun 2021 indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,34% dan terealisasi 0,83%, sehingga capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 138,06% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2017 sebesar 1,38%, tahun 2018 sebesar 1,45%, tahun 2019 sebesar 1,31%, tahun tahun 2020 1,18%, dan tahun 2021 sebesar 0,83%, yang artinya realisasi kinerja terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebesar 1,32%, dan pada tahun 2021 terealisasi 0,83%, dengan demikian target RPJMD untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 137,12%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 0,98% per tahun. Dengan demikian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga masih lebih rendah dibanding Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain Kelahiran (natalitas), Kematian (mortalitas), Perpindahan (migrasi). DP3PPKB Kota Salatiga hanya bisa menjalankan pada pengaturan jumlah kelahiran melalui program KB dan pelayanan KB, dimana jumlah kelahiran tahun 2021 sebanyak 2.240 sedangkan peserta KB baru hanya 2.355, sehingga masih ada ibu melahirkan yang belum mengikuti program KB. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi selama masa pandemi seperti APD baik bagi pemberi pelayanan KB maupun akseptor KB.
2. Melaksanakan pelayanan KB dengan memperhatikan protokol kesehatan terutama untuk KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

3. Peningkatan kualitas tenaga pemberi pelayanan KB di masa pandemi melalui pelatihan CTU.
4. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan dan penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan genre kit, BKB kit, BKL kit, dan KIE kit.
5. Pemberian penghargaan bagi akseptor Modus Operasi Pria (MOP) dan Modus Operasi Wanita (MOW).
6. Melakukan monitoring program KKBKP oleh PLKB di tingkat kelurahan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas IMP (Institusi Masyarakat Pesedaan).

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Laju Pertumbuhan Penduduk	138,06	Pengendalian Penduduk	64.434.700	56.975.400	88,42%	99,36%
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.526.756.900	2.171.163.151	61,56%	99,55%
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	82.605.000	81.552.000	98,73%	99,28%
Efisiensi						**99,40%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp.64.434.700,- dan terealisasi Rp.56.975.400,- atau sebesar 88,42%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp.3.526.756.900,- dan terealisasi Rp.2.171.163.151,- atau sebesar 99,67%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,55%.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp.82.605.000,- dan terealisasi Rp.81.552.000,- atau sebesar 98,73%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,28%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 99,40%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Laju Pertumbuhan Penduduk, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalaian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan advokasi, KIE, pengendalian dan KB, pendayagunaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan KB, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organissai kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga.

5. Tujuan/Sasaran Strategis: Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram, Tertib Dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan.

Tujuan/Sasaran strategis 5 (lima) Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks/Angka Kriminalitas.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Serta Wilayah Yang Kondusif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah:

   - Satpol PP

2. Prevalansi Penyalahgunaan Narkoba

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Data perkembangan tindak kriminal tahun 2017-2021 tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Data Perkembangan Tindak Kriminal Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Tindak kriminal	182	130	163	110	66

Sumber : Badan Kesbangpol

Data perkembangan tindak kriminal di atas digumakan untuk menghitung Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tujuan/Sasaran strategis 5 (lima) yaitu Indeks/Angka Kriminalitas.

Perhitungan IKU Indeks/Angka Kriminalitas di Kota Salatiga menggunakan definisi Angka Kriminalitas atau Angka Kejahatan per 100 (seratus) orang penduduk.

Untuk menghitung Indeks/Angka Kriminalitas digunakan rumus:

$$\textit{Indeks/Angka Kriminalitas} = \frac{\textit{Jumlah kejahatan}}{\textit{Jumlah Penduduk}} \; X \; 100$$

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks/Angka Kriminalitas Pemerintah Kota Salatiga diperoleh dari perhitungan jumlah tindak kejahatan tahun 2021 sebanyak 66 dibagi jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 196.440 dikalikan seratus.

$$0{,}033 = \frac{66}{196.440} \; X \; 100$$

Berdasarkan data di atas, berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Angka Kriminalitas:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Angka Kriminalitas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks/Angka Kriminalitas	Skor	0,13	0,12	0,1	0,1	0,07	0,06
Realisasi							
Indeks/Angka Kriminalitas	Skor	0,15	0,067	0,083	0,056	0,033	
Capaian Kinerja							
Indeks/Angka Kriminalitas	%	84,61	144,17	117	144	152,86	
Kategori		**Baik**	**Sangat BAik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : Badan Kesbangpol

Indikator Indeks/Angka Kriminalitas merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Indeks/ Angka Kriminalitas tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target Indeks/Angka Kriminalitas tahun 2021 sebesar 0,07 dan terealisasi sebesar 0,033 sehingga capaian kinerja indikator Indeks/Angka Kriminalitas adalah 152,86% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
   Realisasi kinerja untuk indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada tahun 2017 sebesar 0,17, tahun 2018 sebesar 0,067, tahun 2019 sebesar 0,087, tahun 2020 sebesar 0,056, dan tahun 2021 sebesar 0,033. Dengan demikian realisasi kinerja dan capaian kinerja semakin meningkat.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**
   Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah sebesar 0,06 sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah 0,033, dengan demikian Pemerintah target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 145%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
   Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks/Angka Kriminalitas.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
   Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas adalah:
   1. Adanya koordinasi yang intens antara Pemerintah Kota salatiga dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah kegiatan cipta kondusifitas Kota Salatiga;
   2. Adanya pemantauan daerah rawan konflik;
   3. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat; melalui sosialisasi orientasi kewaspadaan nasional dalam rangka mengantisipasi radikalisme dan terorisme;
   4. Fasilitasi dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
   5. Sosialisasi wawasan kebangsaan guna menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat dari pelajar, mahasiswa,

pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

6. Operasi gabungan Satpol, TNI dan POLRI untuk penegakan Perda dan Perkada.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Angka Kriminalitas

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks/ Angka Kriminalitas	152,86	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.969.54.700	1.103.549.950	92,20%	99,40%
		Penanggulangan Bencana	71.099.900	22.108.600	31,10%	99,80%
		Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	231.491.300	148.543.250	64,17%	99,58%
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	81.793.000	66.627.000	81,46%	99,47%
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.058.213.964	1.055.205.484	99,72%	99,35%
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.605.561.500	1.587.578.500	98,88%	99,35%
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	167.872.000	119.003.550	70,89%	99,54%
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	548.104.900	524.976.000	95,78%	99,37%
Efisiensi						**99,48%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 (program) untuk mendukung capaian indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada Satpol PP yaitu:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp.1.1969.54.700,- dan terealisasi Rp.1.103.549.950,- atau sebesar 92,20%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,40%.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran Rp.71.099.900,- dan terealisasi Rp.22.108.600,- atau sebesar 31,10%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,80%.
3. Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran Rp. 231.491.300,- dan terealisasi Rp.148.543.250,- atau sebesar 64,17%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,58%.

Terdapat 5 (program) untuk mendukung capaian indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada Badan Kesbangpol yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran Rp.81.793.000,- dan terealisasi Rp.66.627.000,- atau sebesar 81,46%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,47%.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran Rp.1.058.213.964,- dan terealisasi Rp.1.055.205.484,- atau sebesar 99,72%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,35%.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran Rp.1.605.561.500,- dan terealisasi Rp.1.587.578.500,- atau sebesar 98,88%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,35%.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan anggaran Rp.167.872.000,- dan terealisasi Rp.119.003.550,- atau sebesar 70,89%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,54%.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran Rp.548.104.900,- dan terealisasi Rp.524.976.000,- atau sebesar 95,78%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,37%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Indeks/Angka Kriminalitas sebesar 99,48%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini pada Satpol PP adalah:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada.
2. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran mellaui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini pada Badan Kesbangpol adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

6. **Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Dan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata.**

   Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Dan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik.

   Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) adalah:

   1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase jalan dengan kondisi baik.
   2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) adalah:

   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

   Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase wajah kota yang tertata dengan baik diukur berdasarkan Realisasi Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Berikut target program dan capaian tahun 2021 penataan kawasan wajah kota:

Tabel 3.17
Target Penataan Kawasan Wajah Kota

No	Program	Capaian 2021
1	Jl. Diponegoro - Fatmawati	100%
2	Jl. Jenderal Sudirman	0%
3	Jl. RW. Monginsidi	100%
4	Jl. Soekarno Hatta	0%
5	Penataan Bunderan Tamansari	0%
6	Lapangan Pancasila dan sekitarnya	100%
7	Jl. Sukowati-Tentara Pelajar	50%
8	Rest Area Tingkir	0%
9	Bantaran Isep-isep	0%
10	Bendung Andong	100%
11	Jl. Brigjend Sudiarto	100%
12	Jl. Hasanudin	100%
13	Jl. A. Yani	50%

14	Jl. Pattimura	0%
15	Jl. Tingkir - Barukan	0%
16	Jl. Kartini	100%
17	Jl. Osa Maliki	100%
18	Jl. Veteran	0%
19	Jl. Pemuda	0%
20	Jl. Muh Yamin	0%

Sumber : DPUPR

Berdasarkan data di atas, dari 20 ruas jalan yang menjadi target baru terealisasi 10 ruas jalan.
berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	%	50	55	60	65	45	75
Realisasi							
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	%	15,78	25	35	40	50	
Capaian Kinerja							
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	%	31,56	45,45	58,33	61,54	111,11	
Kategori		**Kurang**	**Kurang**	**Cukup**	**Cukup**	**Sangat Baik**	

Sumber: DPUPR

Indikator kawasan wajah kota yang tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Dengan adanya pandemi Covid-19, maka anggaran pembangunan banyak direfocusing untuk penanganan kesehatan, sehingga Target persentase kawasan wajah kota yang tertata baik tahun 2021 yang semula 70% dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 45% yang ditetapkan dalam RKPD 2021 dan terealisasi sebesar 50% sehingga capaian kinerja kawasan wajah kota adalah 111,11% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi tahun 2017 sebesar 15,78%; realisasi tahun 2018 sebesar 25%, realisasi tahun 2019 sebesar 35%, realisasi tahun 2020 sebesar 40% dan realisasi tahun 2021 sebesar 50%. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik selalu mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 75% dan pada tahun 2021 baru tercapai 50%, dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai pada tahun 2021 dengan tingkat kemajuan sebesar 66,67%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian realisasi kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2021 ini disebabkan penataan wajah kota ini menjadi program prioritas bagi Wali Kota terpilih selain itu ketersediaan anggaran juga mendukung tercapainya target persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	111,11	Penyelenggaraan Penataan Ruang	567.239.800	390.668.800	68,87%	99,38%
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya	20.029.429.800	19.684.356.000	99,28%	99,12%
		Penataan Bangunan Gedung	808.499.000	625.665.500	77,39%	99,30%
		Penyelenggaraan Jalan	45.170.846.453	26.580.071.667	58,84%	99,47%
Efisiensi						**99,32%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan Baik yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp.567.239.800,- dan terealisasi Rp.390.668.800,- atau sebesar 68,87%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan anggaran Rp.20.029.429.800,- dan terealisasi Rp.19.684.356.000,- atau sebesar 96,28%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%.
3. Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp.808.499.000,- dan terealisasi Rp.625.665.500,- atau sebesar 77,39%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,30%.
4. Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp.45.170.846.453,- dan terealisasi Rp.26.580.071.667,- atau sebesar 58,84%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,47%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan baik sebesar 99,32%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan Baik di dukung oleh Program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan RTRW, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan strategi sistem penataan bangunan, penataan bangunan dan pemeliharaan bangunan.
3. Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan.
4. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan pengembangan jaringan jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

7. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Drainase, Pengairan Dan Saluran Pembuangan Limbah.

Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Drainase, Pengairan Dan Saluran Pembuangan Limbah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Wilayah Dengan Infrastruktur Kondisi Baik.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase dan pengairan serta pembuangan air limbah dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik
2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Total panjang drainase di Kota Salatiga adalah 381.719,59 meter. Drainase dengan kondisi baik pada tahun 2021 adalah 382.225,67 meter.

Total panjang irigasi di Kota Salatiga adalah 23.735 meter dan irigasi yang berkondisi baik tahun 2021 sepanjang 22.490,6 meter.

Total panjang jalaan di Kota Salatiga adalah 337,471 km dan jalan yang berkondisi mantap tahun 2021 sepanjang 316,368 km.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Wilayah dengan Infrastruktur kondisi baik dihitung dari dari rata-rata realisasi IKD Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase jalan dalam kondisi mantap.

Berikut rumus perhitungan IKU Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik:

$$\textit{Realisasi Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik} = \frac{\textit{persentase jaringan drainase dalam kondisi baik + Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase jalan dalam kondisi mantap}}{3}$$

Berdasarkan rumus diatas maka realisasi kinerja IKU Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik adalah sebagai berikut:

$$\textit{Realisasi Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik} = \frac{100{,}13 + 94{,}75 + 93{,}75}{3} = 96{,}21$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik:

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	65,22	73,91	82,61	91,30	100	100
Realisasi							
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	65,21	82,6	93,45	94,46	96,21	
Capaian Kinerja							
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	99,98	111,75	113,12	103,46	96,21	
Kategori		**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**	

Sumber: DPUPR

Indikator Wilayah dengan kondisi Infrastruktur baik merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Wilayah dengan kondisi Infrastruktur baik tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target Wilayah dengan Infrastruktur baik tahun 2021 adalah 100%. Dan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi tahun 2021 sebesar 96,21%. Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka capaian kinerja untuk Wilayah dengan Infrastruktur baik adalah 96,21% dengan kategori Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
   Realisasi kinerja untuk indikator persentase wilayah dengan infrastruktur baik tahun 2017 adalah 65,21%, tahun 2018 sebesar 82,6%, tahun 2019 sebesar 93,45%, tahun 2020 sebesar 94,46%, dan tahun 2021 sebesar 96,21%. Dengan demikian persentase realisasi wilayah dengan infrastruktur baik selalu meningkat, namun capaian kinerja pada tahun 2021 menurun.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**
   Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator persentase wilayah dengan infrastruktur baik adalah 100%. Sedangkan realisasi tahun 2021 baru mencapai 96,21%. Dengan demikian masih target RPJMD belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan 96,21%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peningkatan realisasi kinerja wilayah dengan infrastruktur kondisi baik terutama terkait dengan masyarakat pengguna sanitasi. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Banyaknya program pemerintah yang menyasar pada bantuan maupun sanitasi layak;
2. Wilayah kota Salatiga yang berupa dataran tinggi menyebabkan tidak ada genangan pada drainase.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	96,21	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.322.661.810	3.132.527.000	94,28%	99,02%
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.949.014.000	3.739.397.018	94,69%	99,02%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.548.104.000	4.413.205.000	97,03%	98,99%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.793.408.000	3.622.267.305	95,49%	99,01%
		Penyelenggaraan Jalan	45.170.846.453	26.580.071.667	58,84%	99,39%
Efisiensi						**99,09%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran Rp. 3.949.014.000,- dan terealisasi Rp. 3.739.397.018,- atau sebesar 95,49%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp.3.322.661.810,- dan terealisasi Rp. 3.132.527.000,- atau sebesar 94,69%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp.4.548.104.000,- dan terealisasi Rp.4.413.205.000,- atau sebesar 97,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,99%.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran Rp.3.793.408.000,- dan terealisasi Rp.3.622.267.305,- atau sebesar 95,49%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
5. Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp.45.170.846.453,- dan terealisasi Rp.26.580.071.667,- atau sebesar 58,84%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,39%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik sebesar 99,09%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja presentase Wilayah dengan Infrastruktur baik antara lain:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
5. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan pengembangan jaringan jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

8. **Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 1(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) adalah:

1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
   a. Indeks Pencemaran Air;
   b. Indeks Pencemaran Udara;
   c. Indeks Tutupan Lahan.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah:
   - Dinas Lingkungan Hidup.
2. Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Transportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase Kendaraan angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) adalah:
   - Dinas Perhubungan.

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara.

Berikut rumus perhitungan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdsarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021:

IKLH	=	**(0,376 x Realisasi Indeks Pencemaran Air) + (0,405 x Realisasi Indeks Pencemaran Udara) + (0,219 x Realiasasi Indeks Tutupan Lahan)**

Berdasarkan rumus diatas maka realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Realisasi IKLH	=	**(0,376 x 42,50) + (0,405 x 79,82) + (0,219 x 47,21)**	**= 58,65**

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks KLH	Nilai	72	75	78	80	63,51	85
Realisasi							
Indeks KLH	Nilai	56,78	59,78	60,05	60,88	58,65	
Capaian Kinerja							
Indeks KLH	%	78,86	79,70	76,98	76,10	92,35	
Kategori		**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 sebesar 63,51 dan terealisasi sebesar 58,65 sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah 92,35% atau dengan kategori Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
   Realisasi kinerja Indeks IKLH Tahun 2017 sebesar 56,78, tahun 2018 sebesar 59,78, tahun 2019 sebesar 60,05, tahun 2020 sebesar 60,88, dan tahun 2021 sebesar 58,65. Dengan demikian realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Salatiga terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**
   Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 85, sedangkan realisasi tahun 2021 baru mencapai 58,65. Dengan demikian target akhir RPJMD masih belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan baru mencapai 69%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Nilai IKLH nasional mencapai 71,43, sedangkan nilai IKLH Kota Salatiga sebesar 58,65. Dengan demikian Nilai IKLH Kota Salatiga masih berada dibawah nilai IKLH Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tidak tercapaiannya target indeks kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021, dikarenakan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri kecil maupun besar, sektor perdagangan dan jasa sehingga menimbulkan timbunan sampah, meningkatkan emisi, meningkatkan beban pencemaran air sungai atau badan air penerima serta mengurangi tutupan lahan.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Melakukan penambahan RTH untuk mengurangi efek dari pencemaran udara.
2. Mengurangi alih fungsi lahan dengan mematuhi Rencana Tata Ruang/Wilayah.
3. Peningkatan Pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup sehingga status mutu air, udara dan vegetasi tetap terjaga.
4. Penegakan hukum lingkungan benar-benar digalakkan dengan memberlakukan sangsi bagi kegiatan/usaha yang tidak mematuhi aturan mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mengembangkan dan meningkatkan jenis investasi yang ramah lingkungan (green investation), sehingga dapat mengurangi dan mencegah dampak negatif pembangunan terhadap kualitas Lingkungan Hidup.
6. Mengembalikan fungsi sungai sebagai badan air, dengan menegaskan larangan membangun di atas sempadan sungai, serta larangan membuang sampah di sungai.
7. Melakukan uji emisi gas buang bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks KLH	92,35	Perencanaan Lingkungan Hidup	199.799.000	183.897.500	92,05%	99,00%
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	220.358.800	182.128.700	82,65%	99,11%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	12.022.074.756	11.031.565.052	91,76%	99,01%
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	308.320.500	212.162.270	68,81%	99,25%
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	32.130.400	19.399.000	60,38	99,35%
		Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48.941.800	19.341.400	39,52%	99,57%
		Pengelolaan Persampahan	1.539.352.453	1.437.277.940	91,99%	99,00%
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.846.917.650	1.671.023.177	90.48%	99,02%
Efisiensi						**99,16%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 7 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp.199.799.000,- dan terealisasi Rp.183.897.500,- atau sebesar 92,05%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp.220.358.800,- dan terealisasi Rp.182.128.700,- atau sebesar 82,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,11%.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan anggaran Rp.12.022.074.756,- dan terealisasi Rp.11.031.565.052,- atau sebesar 91,76%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan anggaran Rp.308.320.500,- dan terealisasi Rp.212.162.270,- atau sebesar 68,81%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,25%.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan anggaran Rp.332.130.400,- dan terealisasi Rp.19.399.000,- atau sebesar 60,38%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,35%.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan anggaran Rp.48.941.800,- dan terealisasi Rp.19.341.400,- atau sebesar 39,52%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,57%.
7. Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 1.539.352.453,- dan terealisasi Rp. 1.437.277.940,- atau sebesar 91,99%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%.

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Dinas Perhubungan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran Rp.1.846.917.650,- dan terealisasi Rp.1.671.023.177,- atau sebesar 90,48%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 99,16%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran

kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terdiri dari 1 kegiatan sasaran kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan limbah B3.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
7. Program Pengelolaan Persampahan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan sampah dan pembinaan, pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perhubungan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 6 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan rencana induk dan jaringan LLAJ dan penyediaan perlengkapan jalan, Pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang antar kota dalam satu daerah, penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah.

9. **Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.**

   Tujuan/Sasaran strategis 9 (sembilan) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Perkotaan Yang Merata Bagi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup hanya terdiri dari 1 (satu)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase kawasan kumuh perkotaan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 9 (sembilan) adalah Meningkatnya Pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat dengan variabel Indikator Kinerja Derah (IKD):

1. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah:

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang adalah 253,66 Ha. Sedangkan realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan tahun 2021 mencapai 147,17 Ha.

Tabel 3.24
Data Perkembangan Penanganan Kawasan Kumuh
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Penanganan Kawasan Kumuh	0	67,09 Ha	61,7 Ha	16,78 Ha	1,6 Ha

Sumber : Dinas PKP

Indikator Kinerja Utama Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan dihitung dengan rumus:

$$\textit{Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan} = \frac{\textit{Luas Kawasan Kumuh – luas Kawasan yang tertangani}}{\textit{Luas Kota salatiga}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2021 sebagai berikut:

$$\textit{Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan} = \frac{\textit{253,66 - 147,17}}{\textit{5498 Ha}} \textit{ X 100\%} \quad \textit{= 1,94\%}$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan:

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,43	4,28	4,22	4,15	3,99	3,99
Realisasi							
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,38	4,08	2,21	1,90	1,94	
Capaian Kinerja							
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	101,13	104,67	147,63	154,22	151,38	
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

Sumber : Dinas PKP

Indikator kinerja indeks Luasan Kawasan Kumuh merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target Luasan kawasan kumuh perkotaan tahun 2021 sebesar 3,99% sedangkan realisasi Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2021 sebesar 1,94% sehingga capaian kinerja yang artinya kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotahun 2021 sebesar 151,38% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
   Realisasi Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2017 sebesar 4,38%, tahun 2018 sebesar 4,08%, tahun 2019 sebesar 2,21%, tahun 2020 sebesar 1,90%, dan tahun 2021 sebesar 1,94% yang artinya kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan terus mengalami kenaikan.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**
   Target Luasan kawasan kumuh perkotaan pada akhir RPJMD adalah sebesar 3,99% sedangkan realisasi kinerja tahun 2021 luasan kawasan kumuh perkotaan sudah mencapai 1,94%. Dengan demikian target RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 151,38%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
   Target nasional sesuai dengan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR sebesar 0%, sementara sampai

dengan akhir tahun 2021 masih terdapat luasan kawasan kumuh sebesar 1,94% di Kota Salatiga.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan indikator ini dikarenakan:

1. Perbaikan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan
2. Meningkatnya fasilitasi pembangunan sarana prasarana pemukiman berbasis masyarakat.
3. Adanya kerjasama dan peran serta masyarakat yang baik antara Pemerintah Kota Salatiga dengan masyarakat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	151,38	Pengembangan Perumahan	499.545.180	487.178.620	97,52%	99,36%
		Kawasan Permukiman	2.938.733.800	2.856.974.462	97,22%	99,36%
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.984.399.682	5.518.390.022	99,21%	99,39%
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	176.240.000	106.341.000	60,34%	99,60%
		Pengelolaan Izin Membuka Tanah	890.409.000	623.504.120	70,02%	99,54%
		Penatagunaan Tanah	576.462.800	494.986.800	85,87%	99,43%
Efisiensi						**99,45%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 6 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan yaitu:

1. Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp.499.545.180,- dan terealisasi Rp.487.178.620,- atau sebesar 97,52%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.
2. Program Kawasan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp.2.938.733.800,- dan terealisasi Rp.2.856.974.462,- atau 97,22%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan anggaran sebesar Rp.5.984.399.682,- dan terealisasi sebesar Rp.5.518.390.022,- atau 99,21%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,39%.
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp.176.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp.106.341.000,- atau 60,34%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,60%.
5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan anggaran sebesar Rp.890.409.000,- dan terealisasi sebesar Rp.623.504.120,- atau 70,02%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,54%.
6. Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran sebesar Rp.576.462.800,- dan terealisasi sebesar Rp.494.986.800,- atau 85,87%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,43%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Luasan Kawasan Kumuh sebesar 99,45%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase luasan kawasan kumuh antara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan.
4. Program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah Garapan.
5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah terdiri dari 2 kegiatan dengan sasarn kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.
6. Program Penatagunaan Tanah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

10. **Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.**

Tujuan/Sasaran Strategis 10 (sepuluh) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja Utama (IKU) yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB perkapita.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

1. Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, Koperasi dan Industri dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
   a. Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina;
   b. Persentase KSP/USP Koperasi Sehat;
   c. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:
   - Dinas Dinas Koperasi dan UKM.
   - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:
   - Dinas Perdagangan

3. Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Jumlah kunjungan wisata.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:
   - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4. Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat dengan variabel Indikator Kinerja Daerah:
   a. Produktivitas tanaman pangan utama (Padi dan Jagung);
   b. Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Daging Sapi Potong.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:
   - Dinas Pertanian

5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase Peningkatan swadaya masyarakat.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:
   - DP3APPKB

10.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Ekonomi:

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,27	5,3	5,33	5,37	2,1	5,45
Realisasi							
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,23	5,21	5,90	-1,68	3,33	
Capaian Kinerja							
Pertumbuhan Ekonomi	%	99	98,3	110,69	-31,28	158,57	
Kategori		Baik	Baik	Sangat Baik	Kurang	Sangat Baik	

Sumber : BPS

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 2,21% dan terealisasi sebesar 3,33%, sehingga capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebesar 158,57% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi untuk indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 5,23%, tahun 2018 sebesar 5,21%, tahun 2019 sebesar 5,90%, tahun 2020 sebesar -1,68%, dan tahun 2021 sebesar 3,33% yang

artinya realisasi indikator Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menurun dan pada tahun 2019 kembali meningkat. Pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 dan meningkat lagi tahun 2021.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 5,45%, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2021 adalah 3,33%. Dengan demikian target RPJMD belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan 61,10%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,69%, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 3,32%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga Tahun 2021 sudah mencapai 3,33%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi secara nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tidak tercapainya target dari indikator ini adalah:

1. Dengan adanya pandemic Covid 19 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga.
2. Tingkat Pengangguran di Kota Salatiga yang cenderung meningkat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.28
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Ekonomi	158,57	Perencanaan dan Pembangunan Industri	323.618.000	290.247.000	89,69%	99,43%
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	29.794.000	22.225.000	74,60%	99,53%

		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25.526.700	25.480.750	99,82%	99,37%
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	17.725.900	17.152.500	96,77%	99,39%
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	59.799.900	57.796.600	96,65%	99,39%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	24.771.000	17.311.000	69,88%	99,56%
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	917.287.500	868.941.500	94,73%	99,40%
		Pengembangan UMKM	70.000.000	32.090.000	45,84%	99,71%
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.094.941.509	1.044.488.231	95,39%	99,40%
		Pemasaran Pariwisata	99.986.800	85.432.750	85,44%	99,46%
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	834.276.150	785.486.600	94,15%	99,41%
Efisiensi						**99,46%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 11 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 323.618.000,- dan terealisasi Rp. 290.247.000,- atau sebesar 89,69%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,43%.
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 29.794.000,- dan terealisasi Rp.22.225.000,- atau 74,60%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,53%.
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp.25.526.700,- dan terealisasi Rp.25.480.750,- atau sebesar 99,82%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,37%.
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran sebesar Rp.17.725.900,- dan terealisasi Rp.17.152.500,- atau sebesar 96,77%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,39%.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran sebesar Rp.59.799.900,- dan terealisasi Rp.57.796.600,- atau sebesar 96,65%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,39%.
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp.24.771.000,- dan terealisasi Rp.17.311.000 atau sebesar 69,88%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,56%.
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran sebesar Rp.917.287.500,- dan terealisasi Rp.868.941.500,- atau sebesar 94,73%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,40%.
8. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dan terealisasi Rp.32.090.000,- atau sebesar 45,84%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,71%.
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan anggaran sebesar Rp.1.094.941.509,- dan terealisasi Rp.1.044.488.231,- atau sebesar 95,39%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,40%.
10. Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.99.986.800,- dan terealisasi Rp.85.432.750,- atau sebesar 85,44%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,46%.
11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp.834.276.150,- dan terealisasi Rp.785.486.600,- atau sebesar 94,15%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,41%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebesar 99,46%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penataan persebaran penduduk.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Koperasi dan UKM antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengawasan dan pengendalian koperasi.
2. Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelatihan bagi SDM Koperasi.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan terwujudnya Raperda Koperasi dan Sarasehan.
5. Progran Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pasar murah, subsidi sembako, fasilitasi sertifikasi HALAL bagi produk UMKM, fasilitasi pembentukan kelompok UMKM berbadan Hukum dan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi/UMKM.
6. Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan terwujudnya portal informasi terpadu UMKM.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan daya Tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata serta pengelolaan destinasi pariwisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari 1 kegiatan dengan sasaran

kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

10.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) PDRB perkapita:

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
PDRB Perkapita

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	58.993	61.973	64.953	67.933	70.913	73.893
Realisasi							
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	53.033	60.540	68.610	68.040	71.260	
Capaian Kinerja							
PDRB Perkapita	%	89,89	97,6	105,63	100,16	100,49	
Kategori		**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : BPS

Indikator kinerja indeks PDRB perkapita merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama PDRB Perkapita tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 70.913 ribu rupiah dan terealisasi sebesar 71.260 ribu rupiah sehingga capaian kinerja adalah 100,49% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi untuk indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 53.033 ribu rupiah, tahun 2018 sebesar 60.540 ribu rupiah, Tahun 2019 sebesar 68.610 ribu rupiah, tahun 2020 sebesar 68.040 ribu rupiah, dan tahun 2021 sebesar 71.260 ribu rupiah.

Artinya realisasi indikator PDRB Perkapita Kota Salatiga terus mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

PDRB per kapita Kota Salatiga tahun 2021 adalah 71.260 ribu rupiah, sedangkan target kinerja PDRB per Kapita yang tertuang dalam RPJMD adalah 73.893 ribu rupiah. Dengan demikian target akhir RPJMD Kota Salatiga belum tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 96,44%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja PDRB Perkapita.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Tambahan investasi masing-masing lapangan usaha berjalan sesuai dengan rencana, baik investasi pemerintah maupun swasta.
2. Sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku ekonomi.
3. Adanya peningkatan daya saing serta promosi-promosi unggulan daerah yang telah dilaksanakan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja PDRB Perkapita

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
PDRB perkapita	100,49	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	95.004.000	91.392.250	96,20%	99,04%
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	24.609.049.900	24.390.347.700	99,11%	99,01%
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	31.113.900	27.177.350	87,35%	99,13%

		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	209.119.600	200.497.100	95,88%	99,05%
Efisiensi						**99,06%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator PDRB perkapita yaitu:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp.95.004.000,- dan terealisasi sebesar Rp.91.392.250,- atau 96,20%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp.24.609.049.900,- dan terealisasi sebesar Rp.24.390.347.700,- atau 99,11%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp.31.113.900,- dan terealisasi sebesar Rp.27.177.350,- atau 87,35%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp.209.119.600,- dan terealisasi sebesar Rp.200.497.100,- atau 95,88%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,05%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja PDRB perkapita sebesar 99,06%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target PDRB perkapita, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, penerbitan izin usaha perdagangan, dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan metrologo legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

11. Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah Yang Mendorong Pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dan Antar Pelaku Investasi Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga.

Tujuan/Sasaran 11 (sebelas) Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah Yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu pertumbuhan nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Strategis 11 (sebelas) adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): kenaikan nilai investasi PMA dan kenaikan nilai investasi PMDN.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Sasaran ini adalah:

   - Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): persentase penempatan tenaga kerja.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

   - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi:

11.1. Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Data perkembangan investasi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.31
Perkembangan Nilai Investasi 2017-2021

Nilai Investasi	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Nilai Investasi PMA	Milyar Rupiah	0	71	970,183	333,121	1.221,011
Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	229,056	174,756	654,454	183,334	92,592
Jumlah	**Milyar Rupiah**	**229,056**	**245,756**	**1.624,637**	**516,455**	**1.313,603**

Sumber : DPMPTSP

Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\textit{investasi tahun n} - \textit{investasi tahun (n-1)}}{\textit{Investasi tahun (n-1)}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2021 sebagai berikut:

$$\textit{154,35} = \frac{\textit{1.313,603} - \textit{516,455}}{\textit{516,455}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan data diatas, berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi sebagai berikut:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pertumbuhan Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	2,34	2,43	2,49	2,66	2,81	3
Realisasi							
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-42,58	7,29	373,11	-68,21	154,35	
Capaian Kinerja							
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0	300	14.984	0	5.493	
Kategori			**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Kurang**	**Sangat Baik**	

Sumber : DPMPTSP

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator kinerja Utama Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target rata-rata tahun 2021 adalah 2,81% dan terealisasi minus 154,35% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 5.493% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi kinerja untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi di Kota Salatiga tahun 2017 sebesar -42,58%, tahun 2018 sebesar 7,29%, 2019 sebesar 373,11%, tahun 2020 sebesar 0%, dan tahun 2021 sebesar 154,35%. Dengan demikian realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

Target akhir jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, pertumbuhan nilai investasi diharapkan mencapai 3%. dengan demikian target akhir RPJMD tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan sebesar 5145%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penyebab tercapainya target pertumbuhan nilai investasi di Kota Salatiga meskipun dalam kondisi pandemi covid-19 antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha;
2. Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif meningkatkan daya tarik investasi
3. Meningkatnya kesadaran investor untuk melaporkan data-data investasi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Nilai Investasi	5493	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	123.999.000	120.563.000	97,23%	99,98%
		Promosi Penanaman Modal	152.672.900	145.002.000	94,98%	99,98%
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	362.409.200	279.167.600	77,03%	99,99%
		Pelayanan Penanaman Modal	273.534.300	253.600.300	92,71%	99,98%
Efisiensi						**99,98%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran Rp.123.999.000,- dan terealisasi Rp.120.563.000,- atau sebesar 97,23%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,98%.
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran Rp.152.672.900,- dan terealisasi Rp.145.002.000,- atau sebesar 94,98%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,98%.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran Rp.362.409.200,- dan terealisasi Rp.279.167.600,- atau sebesar 77,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,99%.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran Rp.273.534.300,- dan terealisasi Rp.253.600.300,- atau sebesar 92,71%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,98%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 99,98%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Nilai Investasi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DPMPTSP antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembuatan peta potensi investasi.
2. Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyeleggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

11.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin kecil tingkat pengangguran terbuka, semakin baik capaiannya kinerja pemerintah.

Pengangguran terbuka meliputi:

a. penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
b. penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;
c. penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
d. penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka:

Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,28	6,13	5,98	5,83	7,5	5,73
Realisasi							
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,96	4,28	4,43	7,44	7,26	
Capaian Kinerja							
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	136,94	130,18	125,92	72,38	103,20	
Kategori		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Cukup**	**Sangat Baik**	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2021 adalah 7,5% terealisasi 7,26% dan capaian indikator kinerja sebesar 103,20% dengan katagori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2017 sebesar 3,96%, tahun 2018 sebesar 4,28%, tahun 2019 sebesar 4,43%, tahun 2020 sebesar 7,44%, dan tahun 2021 sebesar 7,26%. Dengan demikian realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga tahun 2020 menurun, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir jangka menengah RPJMD sebesar 5.73% pada tahun 2021 tercapai 7,26%. Namun demikian persentase TPT tiap tahun cenderung tidak stabil atau selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Target akhir RPJMD

belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan 73,30%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 Jawa Tengah tercatat 5,95% dan TPT Indonesia tercatat 6,49%. Dibandingkan dengan TPT Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah maka persentase TPT Kota Salatiga lebih tinggi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengangguran menjadi permasalahan strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan tingkat pendapatan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Banyaknya pengangguran di Kota Salatiga pada tahun 2021 merupakan efek dari pandemi covid-19

Guna mengatasi masalah pengangguran, Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan berbagai langkah, antara lain:

1. Membuka lapangan pekerjaan di Salatiga dan mencarikan lapangan pekerjaan di luar daerah;
2. Memfasilitasi program pra kerja;
3. Fasilitasi *job cumpasing*;
4. Pemberian bantuan sembako.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.35
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Tingkat Pengangguran Terbuka	103,20	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	231.470.000	884.37.288	38,21%	99,63%
		Hubungan Industrial	133.163.000	121.539.400	91,27%	99,12%
Efisiensi						**99,37%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp.231.470.000,- dan

terealisasi Rp.884.37.288,- atau sebesar 38,21%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,63%.

2. Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp.133.163.000,- dan terealisasi Rp.121.539.400,- atau sebesar 91,27%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 99,37%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta.
2. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan.

12. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Penduduk Miskin dan Skor Pola Pangan Harapan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Cakupan Penanganan PMKS.
   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:
   - Dinas Sosial

2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Proporsi Penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 12 (Dua belas) adalah:

   ➢ Dinas Pangan

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penduduk Miskin:

12.1. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur capaian Indikator Utama Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga digunakan data BPS. Berikut data penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2017-2021:

Tabel 3.36
Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Penduduk Miskin	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Ribu	9,55	9,24	9,206	9,69	10,14

Sumber: BPS

Berdasarkan data diatas, berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 adalah:

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Penduduk Miskin

Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Penduduk Miskin	%	5,14	5,04	4,94	4,84	5,5	4,7
Realisasi							
Penduduk Miskin	%	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14	
Capaian Kinerja							
Penduduk Miskin	%	101.36	103,96	103,64	97,93	106,55	
Kategori		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber: BPS

Indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

   Target Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 5,5% dan terealisasi 5,14% sehingga capaian kinerjanya adalah 106,55% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**

   Realisasi Persentase Penduduk Miskin tahun 2017 sebesar 5,07%, tahun 2018 sebesar 4,84%, tahun 2019 sebesar 4,76%, tahun 2020 sebesar 4,94%, dan tahun 2021 sebesar 5,14%. Dengan demikian Realisasi Kinerja untuk menurunkan angka penduduk miskin di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan selama tahun 2017 sampai dengan 2019 dan menurun pada tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

   Target realisasi kinerja Pesentase Penduduk Miskin Kota Salatiga pada akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 4,7%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2021 adalah 5,14%, dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan 90,64%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

   Berdasarkan data BPS, Persentase Penduduk Miskin Indonesia pada tahun 2021 tercatat 9,71%, sedangkan persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 5,14%. Dengan demikian persentase Persentase penduduk miskin Kota Salatiga lebih rendah daripada nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

   Faktor yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga adalah pandemi covid-19 yang berkelanjutan sehingga berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga meliputi 3 kelompok program, yaitu

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
2. Kelompok program pemberdayaan masyarakat
3. Kelompok program pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Penduduk Miskin	106,55	Pemberdayaan Sosial	934.529.700	880.099.200	94,18%	99,12%
		Rehabilitasi Sosial	1.083.967.900	1.033.090.242	95,31%	99,11%
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.223.282.300	2.101.485.156	94,52%	99,11%
		Penanganan Bencana	1.422.346.030	1.323.209.050	93,03%	99,13%
Efisiensi						**99,11%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran Rp.934.529.700,- dan terealisasi Rp.880.099.200,- atau sebesar 95,64%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%.
2. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp. 1.083.967.900,- dan terealisasi Rp.1.033.090.242,- atau sebesar 95,31%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,11%.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp.2.223.282.300,- dan terealisasi Rp.2.101.485.156,- atau sebesar 94,52%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,11%.
4. Program Penanganan Bencana dengan anggaran Rp. 1.422.346.030,- dan terealisasi Rp.1.323.209.050,- atau sebesar 93,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian

indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin sebesar 99,11%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
2. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan data fakir miskin.
4. Program Penanganan Bencana terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

12.2. Skor Pola Pangan harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) pada Pola Pangan Harapan:

Tabel 3.39
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Pola Pangan Harapan	Skor	91	91,2	91,5	91,7	92	92,2
Realisasi							
Pola Pangan Harapan	Skor	91,8	91	93,5	93,9	90,0	
Capaian Kinerja							
Pola Pangan Harapan	%	100,88	99,78	102,18	102,40	97,83	
Kategori		**Sangat Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**	

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator kinerja Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pola Pangan Harapan dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

   Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2021 sebesar 92 dan terealisasi sebesar 90,0 sehingga capaian kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah 97,83% dengan kategori Baik. Capaian ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Salatiga semakin baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**

   Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2017 sebesar 91,8, tahun 2018 sebesar 91, tahun 2019 sebesar 93,5, tahun 2020 sebesar 93,9, dan tahun 2021 sebesar 90,0. Dengan Demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami penurunan di tahun 2018, meningkat kembali di tahun 2019 dan tahun 2020 dan kembali menurun di tahun 2021.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

   Target Skor Pola Pangan Harapan pada akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 92,2, sedangkan pada tahun 2021 sudah mencapai 90,0 dengan demikian target skor pola pangan pada RPJMD harapan belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan 97,61%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

   Standar nilai Pola Pangan Harapan nasional tahun 2021 adalah 91,6, dengan demikian standar Pola Pangan Harapan Pemerintah Kota Salatiga masih masih dibawah standar nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.**

   Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Peningkatan KAP (knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan local, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.

Kegagalan capaian kinerja karena adanya covid 19 mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan rendahnya kemampuan dalam mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.40
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pola Pangan Harapan	97,83	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	387.916.100	365.549.000	94,23%	99,04%
		Penanganan Kerawanan Pangan	495.139.500	486.608.000	98,28%	99,00%
		Pengawasan Keamanan Pangan	6.623.100	5.943.100	89,73%	99,08%
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.000.273.800	889.616.900	88,94%	99,09%
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	188.458.501	179.582.000	95,29%	99,03%
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.689.928.800	1.594.061.000	94,33%	99,04%
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	97.565.000	93.711.600	96,05%	99,02%
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	89.695.000	86.656.000	96,61%	99,01%
		Penyuluhan Pertanian	543.079.100	516.436.100	95,09%	99,03%
Efisiensi						**99,04%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 9 program untuk mendukung capaian indikator Pola Pangan Harapan yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran Rp.387.916.100,- dan terealisasi Rp. 365.549.000,-

atau sebesar 94,23%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran Rp.495.139.500,- dan terealisasi Rp.486.608.000,- atau sebesar 98,28%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp.6.623.100,- dan terealisasi Rp.5.943.100,- atau sebesar 94,52%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran Rp.1.000.273.800,- dan terealisasi Rp.889.616.900,- atau sebesar 88,94%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,09%.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran Rp.188.458.501,- dan terealisasi Rp.179.582.000,- atau sebesar 95,29%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran Rp.1.689.928.800,- dan terealisasi Rp.1.594.061.000,- atau sebesar 94,33%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran Rp.97.565.000,- dan terealisasi Rp.93.711.600,- atau sebesar 96,05%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran Rp. 89.695.000,- dan terealisasi Rp. 86.656.000,- atau sebesar 96,61%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
9. Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp. 543.079.100,- dan terealisasi Rp. 516.436.100,- atau sebesar 95,09%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan sebesar 99,04%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam upaya meningkatkan skor Pola Pangan Harapan, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pangan segar.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik hewan tumbuhan dan mikro organisme, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak,
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembangunan prasarana pertanian dan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.
7. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran pelaksanaan penyuluhan pertanian.
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penjaminan kesehatan

hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis masyarakat veteriner.

13. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, Dan Pencapaian Kesetaraan Dan Keadilan Gender

Tujuan/Sasaran strategis 13 (tiga belas) Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Capaian Kota Layak Anak (KLA),
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG),
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

1. Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan
2. Persentase Perempuan dalam Parlemen
3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender:

13.1. Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Capaian Kota Layak Anak:

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian Kota Layak Anak

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	239	500	650	675	675	675
Realisasi							
Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	275	606,5	794,95	794,95	607,35	
Capaian Kinerja							
Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	115	121,3	122,3	117,77	89,98	
Kategori		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**	

Sumber: DP3APPKB

Indikator kinerja Capaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Capaian Kota Layak anak dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target skor Capaian KLA tahun 2021 adalah sebesar 675 dan terealisasi sebesar 607,35, sehingga capaian kinerja indikator skor Capaian Kota Layak Anak adalah 89,98 dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator skor capaian KLA tahun 2017 sebesar 275, tahun 2018 sebesar 606,5, tahun 2019 sebesar 794,95, tahun 2020 sebesar 794,5, tahun 2021 607,35 yang artinya realisasi kinerja untuk indikator skor KLA terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 dan menurun ditahun 2021.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator skor capaian KLA adalah sebesar 680, sedangkan realisasi tahun 2021 adalah 607,35, dengan demikian target RPJMD untuk indikator skor capaian KLA belum tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 89,32%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2021 sebesar 607,35, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan skor 607,35 poin tersebut pada tahun 2021 Kota Salatiga mendapatkan Predikat Menuju Kota Layak Anak Kategori Madya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian indikator kinerja untuk Kota Layak Anak tidak terlepas dari peran semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung pengisian dan verifikasi data Kota Layak Anak terkait dalam penyiapan data dan verifikasi Kota Layak Anak yang didalamnya tercakup unsur pemenuhan hak-hak anak. Upaya yang dilakukan untuk mencapai skor Kota Layak Anak antara lain:

1. Advokasi pendidik sebaya pencegahan kekerasan pada anak di sekolah;
2. Orientasi sistem perlindungan anak (SPA) bagi aparat kelurahan kecamatan
3. Lokakarya Disiplin positif menuju Sekolah Ramah Anak (LRA)
4. Sosialisasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih sayang dalam keluarga.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.42
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Capaian Kota Layak Anak

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Kota Layak Anak (KLA)	89,98	Perlindungan Khusus Anak	20.223.000	17.917.200	88,60%	99,02%
		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	46.795.000	429.73.000	91,83%	98,98%
		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	71.914.000	69.652.000	96,85%	98,92%
Efisiensi						**98,97%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator Kota Layak Anak (KLA) yaitu:

1. Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran Rp.20.223.000,- dan terealisasi Rp.17.917.200,- atau sebesar 88,60%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan anggaran Rp.46.795.000,- dan terealisasi Rp.429.73.000,- atau sebesar 91,83%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,98%.
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan anggaran Rp.71.914.000,- dan terealisasi Rp.69.652.000,- atau sebesar 96,85 sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,82%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Kota Layak Anak 98,97%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian KLA, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

13.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan suatu indeks untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berikut tabel

capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Gender:

Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	96,22	96,41	96,61	96,81	97,01	97,20
Realisasi							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	96,02	95,34	95,12	95	95,18	
Capaian Kinerja							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	99,79	98,89	98,46	98,13	98,11	
Kategori		**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Sumber : BPS

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 adalah 97,01 dan terealisasi dengan skor 95,18 sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 98,11% dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017 sebesar 96,02, tahun 2018 sebesar 95,34, tahun 2019 sebesar 95,12, tahun 2020 sebesar 95, dan tahun 2021 sebesar 95,18. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target jangka menengah pada akhir RPJMD Tahun 2022 untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 97,20 dan pada tahun 2021 baru tercapai 95,18. Dengan

demikian target akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan sebesar 97,92%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan data BPS, nilai (IPG) Jawa Tengah adalah 92,18 dan nilai IPG nasional adalah 91,06. Dengan demikian, nilai IPG Kota Salatiga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPG Jawa Tengah dan nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada implementasinya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan persamaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi Pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. nilai IPG dipengaruhi karena adanya beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.44
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks Pembagunan Gender (IPG)	98,11	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	339.727.000	318.747.000	93,82%	99,04%

		Perlindungan Perempuan	81.002.000	64.364.003	79,46%	99,19%
		Peningkatan Kualitas Keluarga	898.607.000	826.765.900	92,01%	99,06%
Efisiensi						**99,10%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp.339.727.000,- dan terealisasi Rp.318.747.000,- atau sebesar 93,82%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp.81.002.000,- dan terealisasi Rp.64.364.003,- atau sebesar 79,46%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran Rp.898.607.000,- dan terealisasi Rp.826.765.900,- atau sebesar 92,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99,10%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian IPG, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hokum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

13.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada dasarnya sama dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) namun Indeks Pemberdayaan Gender mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Angka IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Pemberdayaan Gender:

Tabel 3.45
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	80,95	81,08	81,20	81,33	81,45	81,57
Realisasi							
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	80,83	80,83	82,16	76,19	76,07	
Capaian Kinerja							
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	99,85	99,69	101,18	93,68	93,39	
Kategori		**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**	**Baik**	

Sumber: BPS

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.
Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 adalah 81,57dan terealisasi sebesar 76,07 sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 93,39% dengan kategori Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
   Realisasi kinerja nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2017 sebesar 80,83, tahun 2018 sebesar 80,83, tahun 2019 sebesar 82,16, tahun 2020 sebesar 76,19, dan tahun 2021 sebesar 76,07 Dengan demikian realisasi dan

capaian kinerja untuk indikator nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami penurunan di tahun 2020 dan tahun 2021.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**
Target pada akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator IDG adalah sebesar 81,57, sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah 76,07. Dengan demikian target akhir RPJMD untuk indikator IDG belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan sebesar 93,26%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Berdasarkan data BPS, nilai IDG Jawa Tengah adalah 71,73, dan nilai IDG nasional adalah 75,57. Dengan demikian, nilai IDG Kota Salatiga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan IDG Jawa Tengah dan nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ataupun di tempat kerja. Kesetaraan Gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Dalam dunia politik, ketimpangan gender tampak dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPRD jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Dalam aspek ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak meningkat.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.46
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	93,39	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	339.727.000	318.747.000	93,82%	99,00%
		Perlindungan Perempuan	81.002.000	64.364.003	79,46%	99,15%
Efisiensi						**99,02%**

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp.339.727.000,- dan terealisasi Rp.318.747.000,- atau sebesar 93,82%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp.81.002.000,- dan terealisasi Rp.64.364.003,- atau sebesar 79,46%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebesar 99,02%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian IDG, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hokum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

13.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia:

Tabel 3.47
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	81,65	82,16	82,67	83,18	75	84,20
Realisasi							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	81,14	81,68	82,41	83,14	83,60	
Capaian Kinerja							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	99,38	99,42	99,69	99,95	111,47	
Kategori		**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber : BPS

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 adalah 75 dan realisasi nilai IPM tahun 2021 adalah 83,60 dengan demikian capaian kinerja tahun 2021 sebesar 111,47% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Indeks IPM tahun 2017 sebesar 81,14; tahun 2018 sebesar 81,68, tahun 2019 sebesar 82,41, tahun 2020 sebesar 83,14, dan tahun 2021 sebesar 83,60.

Dengan demikian realisasi dan capaian Indeks IPM Kota Salatiga terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target Akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator IPM adalah sebesar 84,20 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar sebesar 83,60 sehingga target akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan sebesar 99,29%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.

Berdasarkan data BPS, nilai IPM nasional sebesar 72,29 dan IPM Jawa Tengah sebesar 72,16 dengan demikian maka capaian IPM Kota Salatiga telah melebihi capaian IPM Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Per Kapita. Dari ke empat komponen pendukung tersebut realisasi tiap tahun di Kota Salatiga selalu meningkat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator IPM adalah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

program yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator IPM adalah pelaksanaan program yang dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta Peningkatan PDRB Per Kapita.

Berdasarkan perhitungan efisiensi 4 komponen di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 99,08%.

14. **Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan**

Tujuan/Sasaran Strategis 14 (empat belas) Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks PMPRB.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Strategis 14 (empat belas) adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat).

   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:
   - Sekretariat Daerah
   - Sekretariat DPRD
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Kecamatan

2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi dengan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
   a. Tingkat ketersediaan media informasi publik; tingkat pengembangan layanan e government dan smart city; persentase ketersediaan data statistik;
      Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
   b. persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e arsip)
      Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Indeks Profesionalitas ASN
   Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4. Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
   a. Opini BPK

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- Inspektorat
- Badan Keuangan Daerah

b. Skor LAKIP/LKjIP

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- Sekretariat Daerah
- Bappeda

Indeks PMPRB merupakan Penilaian Mandiri yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga dengan menggunakan LHE melalui aplikasi PMPRB, yang selanjutnya akan dievaluasi dan menghasilkan Indeks RB.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB:

Tabel 3.48
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
Target							
Indeks PMPRB	%	60	60	62	62	65	65
Realisasi							
Indeks PMPRB	%	58,25	75,4	82,11	77,84	70,95	
Capaian Kinerja							
Indeks PMPRB	%	97,08	125,66	157,66	119,75	109,15	
Kategori		**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Sumber: Inspektorat

Indikator kinerja Indeks PMPRB) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks PMPRB pada tahun 2021 adalah 61 terealisasi dan 70,95. Nilai Indeks PMPRB ini adalah realisasi PMPRB tahun 2021 dan akan dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian realisasi target Indeks PMPRB tahun 2021 sebesar 109,15% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja nilai indeks PMPRB tahun 2017 sebesar 58,25, tahun 2018 sebesar 75,4, tahun 2019 sebesar 82,11, tahun

2020 sebesar 77,84, dan tahun 2021 sebesar 70,95. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Indeks PMPRB terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 dan menurun di tahun 2021.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target jangka menengah pada akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator indeks PMPRB adalah 65 dan pada tahun 2021 sudah tercapai nilai indeks PMPRB 70,95. Dengan demikian target RPJMD untuk indikator Indeks PMPRB telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 109,15%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks PMPRB.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan meningkatkan nilai PMPRB yang melampaui target disebabkan oleh pelaksanaan PMPRB telah mengacu pada Road Map RB Pemerintah Kota Salatiga tahun 2020-2022 yang tertuang dalam rencana aksi yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan instrument penilaian LKE RB.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.49
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Indeks PMPRB

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks PMPRB	109,15	Penyelenggaraan Pengawasan	58.130.700	22.173.400	38,14%	99,65%
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	316.954.600	258.987.000	81,71%	99,25%
		Pembinaan Perpustakaan	605.146.000	556.353.850	91,94%	99,16%
		Pengelolaan Arsip	510.635.600	478.134.250	93,64%	99,14%
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3.998.800	3.433.300	85,86%	99,21%
		Informasi dan	637.056.600	5543.27.986	87,01%	99,20%

		Komunikasi Publik				
		Aplikasi Informatika	3.392.015.600	3.349.716.050	98,75%	99,10%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	86.194.000	36.444.000	42,48%	99,61%
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	106.967.600	92.394.129	86,38%	99,21%
		Kepegawaian Daerah	2045908050	1569325933	76,71%	99,30%
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	3604745900	2184922741	60,61%	99,44%
		Pendaftaran Penduduk	851.931.800	547.334.600	64,25%	99,41%
		Pencatatan Sipil	80.187.600	51.133.000	63,77%	99,42%
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	53.984.000	47.374.075	87,76%	99,20%
		Pengelolaan Keuangan Daerah	4.913.998.000	2.084.536.013	42,42%	99,61%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.537.738.300	1.080.021.828	70,23%	99,36%
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	596.788.300	498.887.050	83,60%	99,23%
		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	930.218.400	809.671.650	87,04%	99,20%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.838.275.500	1.638.119.000	89,11%	99,18%
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.177.800	53.564.500	65,98%	99,40%
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24.151.25.2900	15.393.962.370	63,74%	99,42%
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.303.068.500	1.684.406.000	73,14%	99,33%
		Perekonomian dan Pembangunan	1.082.301.500	921.261.400	85,12%	99,22%
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	248.438.000	223.227.700	89,85%	99,18%
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.769.254.800	32.258.981.750	98,44%	99,10%

		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.373.690.600	2.365.239.650	99,64%	99,09%
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	231.400.300	231.400.300	92,39%	99,15%
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	698321058119	645145591925	92,39%	99,15%
Efisiensi						**99,28%**

Sumber: Data yang diolah

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Inspektorat yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.58.130.700,- dan terealisasi sebesar Rp.22.173.400,- atau sebesar 38,14%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,65%.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp. 316.954.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 258.987.000,- atau sebesar 81,71%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,25%.

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp.605.146.000,- dan terealisasi sebesar Rp.556.353.850,- atau sebesar 91,94%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,16%.
2. Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran sebesar Rp.510.635.600,- dan terealisasi sebesar Rp.478.134.250,- atau sebesar 93,64%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%.
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan anggaran sebesar Rp.3.998.800,- dan terealisasi sebesar Rp.3.433.300,- atau sebesar 85,86%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,21%.

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Dinas Kominfo yaitu:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp.637.056.600,- dan terealisasi sebesar Rp.554.327.986,- atau sebesar 87,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%.

2. Program Aplikasi Informatika anggaran sebesar Rp.3.392.015.600,- dan terealisasi sebesar Rp.3.349.716.050,- atau sebesar 87,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral anggaran sebesar Rp.86.194.000,- dan terealisasi sebesar Rp.36.444.000,- atau sebesar 42,48%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,61%.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi anggaran sebesar Rp. 106.967.600,- dan terealisasi sebesar Rp.92.394.129,- atau sebesar 86,38%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,21%.

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada BKPSDM yaitu:

1. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp.2.045.908.050,- dan terealisasi sebesar Rp1.569.325.933,- atau sebesar 76,71%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,30%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp.3.604.745.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.184.922.741,- atau sebesar 60,61%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,44%.

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar Rp.851.931.800,- dan terealisasi sebesar Rp.547.334.600,- atau sebesar 64,25%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,41%.
2. Program Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp.80.187.600,- dan terealisasi sebesar Rp.51.133.000,- atau sebesar 63,77%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,42%.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.53.984.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.374.075,- atau sebesar 87,76%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%.

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada BPKPD yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.4.913.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.084.536.013,- atau sebesar 42,42%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,61%.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.537.738.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.080.021.828,- atau sebesar 70,23%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,36%.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.596.788.300,- dan terealisasi sebesar Rp.498.887.050,- atau sebesar 83,60%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,23%.

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada BAPPEDA yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1930.218.400,- dan terealisasi sebesar Rp.809.671.650,- atau sebesar 87,04%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.838.275.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.638.119.000,- atau sebesar 89,11%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,18%.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.81.177.800,- dan terealisasi sebesar Rp.53.564.500,- atau sebesar 65,98%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,40%.

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Sekretariat DPRD yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.24.151.252.900,- dan terealisasi sebesar Rp.15.393.962.370,- atau sebesar 63,74%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,42%.

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Sekretariat Daerah yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp.2.303.068.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.684.406.000,- atau sebesar 73,14%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,33%.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.1.082.301.500,- dan terealisasi sebesar Rp.921.261.400,- atau sebesar 85,12%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,22%.

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada Kecamatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp.248.438.000,- dan terealisasi sebesar Rp.223.227.700,- atau sebesar 89,85%,

sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,18%.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.32.769.254.800,- dan terealisasi sebesar Rp.32.258.981.750,- atau sebesar 98,44%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp.2.373.690.600,- dan terealisasi sebesar Rp.2.365.239.650,- atau sebesar 99,64%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,09%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp.231.400.300,- dan terealisasi sebesar Rp.213.801.700,- atau sebesar 92,39%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%.

Terdapat program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB pada seluruh Perangkat Daerah yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.698.321.058.119,- dan terealisasi sebesar Rp.645.145.591.925,- atau sebesar 92,39%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks PMPRB sebesar 99,28%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Inspektorat Daerah antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pegawasan internal sasaran kinerjanya yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan regular, evaluasi reviu, audit kinerja, audit kepatuhan, probity audit, Kerjasama pengawasan APIP-APH serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal. Sedangkan untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sasaran kinerjanya yaitu penerbitan LHP tujuan tertentu, pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, dan pemeriksaan khusus, serta terlaksananya penanganan kerugian daerah oleh TPKD dan Sekretariat TPKD.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kegiatan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sasaran kinerjanya yaitu dokumen kebijakan pengawasan, SOP, PKPT dan pembaharuan audit charter,

sedangkan untuk kegiatan pendampingan dan asistensi sasaran kinerjanya adalah klinik konsultasi, workshop atau sosialisasi SPIP dan Maturitas SPIP, penilaian RB, sosialisasi WBK/WBBM dan pembangunan ZI, operasionalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar, Workshop Pengendalian Gratifikasi, sosialisasi LHKPN/LHKASN, verifikasi LHKASN, peringatan hari anti korupsi, monev korsupgah, survei IPAK dan SPI.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

1. Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
2. Program Pengelolaan Arsip terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional.
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengelolaan nama domain dan sub domain serta pengelolaan e government.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data statistik sektoral, pengembangan infrastruktur serta penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengamanan informasi dan penyediaan layanan keamanan informasi.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BKPSDM antara lain:

1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan penataan pendaftaran penduduk
2. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan serta pembinaan dan pengawasan, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BPKPD antara lain:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BAPPEDA antara lain:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanan bidang perekonomian dan SDA serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Sekretariat DPRD antara lain Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 8 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Sekretariat Daerah antara lain:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum dan fasilitasi kerja sama daerah.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan baran dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Kecamatan antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang didasarkan atas prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah.

Sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021, disusun dengan pendekatan kinerja dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Usulan program kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program. Penilaian kewajaran dan kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan, dapat dilihat dari

pelaksanaan program yang sudah diselesaikan oleh perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan dalam capaian kinerja yang direncanakan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Target Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp.916.251.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp.946.191.087.524,- atau 103,27%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 890.223.683.933,- maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.55.967.403.591,- atau sebesar 6,29%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih relatif rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan tahun 2020 mencapai Rp.280.701.251.597,- atau 118,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.237.406.216.000,-. Jika dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp. 219.553.318.240,- maka realisasi tahun 2021 naik sebesar Rp.61.147.933.357 atau 27,85%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.50
Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2012 - 2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan Daerah (Realisasi)	Proporsi %
2012	63.171.463.000	77.798.870.961	562.323.845.006	13.84 %
2013	87.723.650.000	106.100.450.499	603.204.201.915	17.59 %
2014	114.781.747.000	165.747.645.080	727.619.868.812	22.78%
2015	143.835.170.000	167.010.555.173	673.865.039.498	24,78%
2016	172.775.326.000	203.768.652.017	879.784.189.262	23,16%
2017	188.391.649.000	218.453.587.980	880.956.308.959	24.80%
2018	209.772.712.000	208.926.057.032	889.992.411.250	23,48%
2019	221.089.796.000	236.086.218.372	928.019.899.150	25,44%
2020	197.768.282.000	219.553.318.240	890.223.683.933	24,66%
2021	237.406.216.000	280.701.251.597	946.191.087.524	29,67%

Sumber : BPKPD (diolah)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.068.992.597.512,- dan terealisasi sebesar Rp.956.501.304.732,- atau sebesar 89,48%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.944.296.168.940,- maka mengalami kenaikan sebesar Rp.12.205.135.790,-. atau sebesar 1,29%.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.155.741.332.512,- dan realisasinya sebesar Rp.155.741.332.512,- atau mencapai 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 219.457.736.000, maka mengalami penurunan sebesar Rp.63.716.403.488,- atau 40,91%.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,- dan realisasinya mencapai Rp. 3.000.000.000,- atau 100,00%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 9.000.000.000,- , maka realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.6.000.000.000,- atau sebesar 200%.

Pembiayaan Netto tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.152.741.332.512,- dan realisasinya mencapai Rp.152.741.332.512,- atau 100%. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.210.471.861.483,- maka realisasi pembiayaan netto tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.57.730.528.971,- atau 37,80%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.142.431.115.304,- Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 155.741.332.512,- maka realisasi SILPA Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.13.310.217.208,- atau 9,35%.

BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2021, berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021:

Tabel 4.1
Data Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Kategori	Efisiensi
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah	9,93 tahun	10,66 tahun	107,35%	Sangat Baik	99,11%
		Harapan Lama Sekolah	14,99 tahun	15,42 tahun	102,87%	Sangat Baik	99,08%
2	Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	54%	118,53%	219,50%	Sangat Baik	99,59%
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat dalam Porda	Rangking 5	Rangking 6	80%	Baik	99,81%
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Usia Harapan Hidup	77,31 tahun	77,55 tahun	100,31%	Sangat Baik	99,08%
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,34%	0,83%	138,06%	Sangat Baik	99,40%
5	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks/ Angka Kriminalitas	0,07	0,033	152,86%	Sangat Baik	99,48%
6	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	kawasan wajah Kota yang tertata dengan baik	45%	50%	111,11%	Sangat Baik	99,32%

7	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	100,00%	96,21%	96,21%	Baik	99,09%
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,51	58,65	92,35	Baik	99,16%
9	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	3,99%	1,94%	151,38%	Sangat Baik	99,45%
10	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk	Pertumbuhan ekonomi	2,1%	3,33%	158,57%	Sangat Baik	99,46%
		PDRB Perkapita (ribu rupiah)	70.913 Ribu Rupiah	71.260 Ribu Rupiah	109,49%	Sangat Baik	99,06%
11	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	2,81%	154,35%	5492,88 %	Sangat Baik	99,98%
		Tingkat pengangguran terbuka	7,5%	7,26%	103,20%	Sangat Baik	99,37%
12	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Prosentase Penduduk Miskin	5,5%	5,14%	106,55%	Sangat Baik	99,11%
		Skor Pola Pangan Harapan	92	90	97,83%	Baik	99,04%

13	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Skor capaian Kota Layak Anak (KLA)	675	607,35	89,98%	Baik	99,97%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,01	95,18	98,11%	Baik	99,10%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,45	76,07	93,39%	Baik	99,02%
		Indeks Pembangunan Manusia IPM)	75	83,60	111,47%	Sangat Baik	99,08%
14	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	65	70,95	109,15%	Sangat Baik	99,28%
EFISIENSI							**99,27%**

Sumber: Data yang diolah

Hasil pengukuran kinerja terhadap 14 sasaran dengan 22 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2021 disimpulkan bahwa **15** (lima belas) Indikator Kinerja Utama atau **68,18%** dikategorikan **Sangat Baik**, **7** (tujuh) Indikator Kinerja Utama atau **31,82%** dikategorikan **Baik**.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pencapaian 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp.1.068.992.597.512,- dengan realisasi sebesar Rp.956.501.304.732,- atau sebesar 89,48%.

Berdasarkan data diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian 22 indikator kinerja Pemerintah Kota Salatiga sebesar 99,27%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2021. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.